

**PERANAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DALAM PEMASARAN IKAN
HASIL TANGKAPAN NELAYAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)
BULU DESA BULUMEDURO KECAMATAN BANCAR
KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR**

**SKRIPSI
PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN**

**Oleh:
FARID KURNIAWAN ADITAMA
NIM. 125080400111088**



FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2016

**PERANAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DALAM PEMASARAN IKAN
HASIL TANGKAPAN NELAYAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)
BULU DESA BULUMEDURO KECAMATAN BANCAR
KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR**

**SKRIPSI
PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan
di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya

Oleh:
FARID KURNIAWAN ADITAMA
NIM. 125080400111088



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**

LAPORAN SKRIPSI

**PERANAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DALAM PEMASARAN IKAN
HASIL TANGKAPAN NELAYAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)
BULU DESA BULUMEDURO KECAMATAN BANCAR
KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR**

Oleh:
FARID KURNIAWAN ADITAMA
NIM. 125080400111088

Telah dipertahankan didepan penguji
Pada tanggal 06 September 2016
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
SK Dekan No:
Tanggal:

Dosen Penguji I



Dr. Ir. Nuddin Harahab, MP
NIP. 19610417 199003 1 001
Tanggal : 08 SEP 2016

**Menyetujui
Dosen Pembimbing I**



Dr. Ir. Edi Susilo, MS
NIP. 19591205 198503 1 003
Tanggal:

08 SEP 2016

Dosen Penguji II



Zainal Abidin, S.Pi, MP, MBA
NIP. 19770221 200212 1 008
Tanggal: 08 SEP 2016

Pembimbing II



Dr. Ir. Pudji Purwanti, MP
NIP. 19640228 198903 2 011
Tanggal:

08 SEP 2016



**Mengetahui
Ketua Jurusan SEPK**

Dr. Ir. Nuddin Harahab, MP
NIP. 19610417 199003 1 001
Tanggal:

08 SEP 2016

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya tulis ini benar - benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi ini hasil penjiplakan (plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.



Malang, 15 Agustus 2016

Mahasiswa

Farid Kurniawan A

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT dan junjungan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis diberikan kesehatan selalu dan kesempatan untuk menyelesaikan Skripsi. Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat kelulusan bagi para mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya, Malang.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih karena telah terselesaikannya Skripsi ini kepada :

- Allah SWT yang telah meridhoi dan memberi kelancaran atas tersusunnya laporan skripsi ini.
- Dr. Ir. Edi Susilo, MS dan Dr. Ir. Pudji Purwanti, MP selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran bagi penulis dengan segala kekurangannya.
- Dr. Ir. Nuddin Harahab, MP dan Zainal Abidin, S.Pi, MP, MBA selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi.
- Bapak Badrodin dan Bapak Sudarwito selaku UPTD dan Administratur TPI beserta seluruh karyawan TPI yang telah memberikan informasi serta kesempatan untuk berbagi ilmu dan pengalaman.
- Bapak Marjono, Ibu Fatimatuzuhro, Yudhistira Areza Pramudana selaku keluarga yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan doa.
- Andrea Widya dan seluruh sahabat – sahabat AP 2012 yang telah memberikan semangat, motivasi, dukungan dan doa selama ini.

RINGKASAN

FARID KURNIAWAN ADITAMA. Peranan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dalam Penjualan Ikan Hasil Tangkapan Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bulu Desa Bulumeduro Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, Jawa Timur (dibawah bimbingan **Dr. Ir. Edi Susilo, MS** dan **Dr. Ir. Pudji Purwanti, MP**)

Dalam mengembangkan sektor perikanan, pemerintah memegang peranan penting. Pemerintah menyediakan berbagai fasilitas penunjang yang dapat memberikan kemudahan dalam melakukan usaha disektor perikanan. Sarana yang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan sektor perikanan khususnya kegiatan penangkapan ikan adalah tersedianya Tempat Pelelangan Ikan. Di Jawa Timur terdapat beberapa TPI, salah satunya adalah TPI Bulu yang berada di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. TPI Bulu merupakan sarana hasil perikanan laut yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Bulu. Berdasarkan uraian, maka tujuan dari penelitian adalah mendeskripsikan profil dan kegiatan yang ada di TPI Bulu, peranan TPI dalam pelaksanaan jual beli ikan hasil tangkapan, kelebihan dan kekurangan jual beli ikan melalui TPI dan di luar TPI, menghitung tingkat pendapatan nelayan yang menjual ikan melalui TPI dan di luar TPI.

Penelitian menggunakan metode studi kasus. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Dan sampel yang dijadikan *key informan* sebanyak 6 pihak TPI, 16 nelayan (penjual), 6 bakul (pembeli). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis data deskriptif kualitatif dan analisis pendapatan nelayan.

Tahun 1986 TPI dengan bangunan sederhana berdiri di tanah kas Desa Bulumeduro. pada tahun 2000-2014 tidak ada aktivitas pelelangan ikan di TPI karena banyak permasalahan yang terjadi. Pada tahun 2014 TPI Bulu dengan bangunan baru telah diresmikan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban dibantu UPTD perikanan Bancar dan seorang Administratur TPI yang menjadi pihak penyelenggara di TPI Bulu. Aktivitas pelelangan ikan di TPI Bulu berjalan dengan baik karena didukung dengan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang memadai serta kinerja karyawan TPI yang baik.

Peran TPI terhadap pelaksanaan jual beli hasil tangkapan ikan bagi nelayan dan bakul ikan meliputi proses kegiatan lelang dan kegiatan administrasi. Proses pelelangan dilaksanakan secara lelang terbuka atau lelang terbuka melalui *sampel* dengan sistem penawaran meningkat. Dalam proses pelelangan, nelayan (penjual) dipungut retribusi yaitu sebesar 2,5% dan bakul (konsumen) dipungut retribusi sebesar 2,5% sesuai dengan Perbup No. 49 tahun 2014. Proses pelelangan sampai proses administrasi berjalan dengan baik namun terdapat beberapa bakul yang kurang tertib.

Banyak kelebihan dan manfaat yang dirasakan untuk nelayan dan bakul yang mengikuti jual beli secara lelang di TPI. Pihak TPI memberikan kemudahan dalam kegiatan pelelangan maupun kegiatan administrasi pelelangan. Namun ada beberapa dari nelayan dan bakul yang lebih memilih menjual ikan hasil tangkapannya di luar TPI karena hasil tangkapan sedikit, nelayan merangkap bakul, dan telah memiliki ikatan kerjasama dengan bakul.

Harga jual ikan yang diterima nelayan di TPI lebih tinggi dibandingkan dengan di luar TPI. Pendapatan yang diterima nelayan selama melaut dikalikan

dengan mengkalikan antara jumlah hasil tangkapan dengan harga ikan per kilogram, dikurangi tarif retribusi, dan biaya operasional. Pendapatan bersih yang diterima nelayan dibagikan kepada pemilik kapal, nahkoda, dan para ABK yang ikut melaut dengan persentase yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan melaut. Alat tangkap yang digunakan nelayan yang menjual hasil tangkapannya ke TPI yaitu *purse sei* dan, payang gardan. Sedangkan nelayan yang menjual hasil tangkapan di luar TPI menggunakan alat tangkap jaring (*gill net*) dan "Othok".

Kesimpulan dari penelitian yaitu kegiatan perikanan yang ada di TPI Bulu belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan pemerintah, karena masih ada nelayan yang melakukan bongkar muat dan jual beli di luar TPI. Peranan TPI dalam penjualan ikan hasil tangkapan nelayan sudah berjalan dengan cukup baik, hanya saja terdapat sedikit kendala dari bakul yang kurang tertib mengikuti aturan lelang dan merasa keberatan dengan besarnya tarif retribusi yang ditetapkan. Banyak kelebihan yang didapat nelayan dan bakul dari kegiatan lelang di TPI, tetapi masih ada nelayan dan bakul yang melakukan transaksi jual beli di luar TPI dengan alasan masing-masing. Harga jual ikan melalui TPI lebih tinggi dibanding diluar TPI dan pendapatan nelayan tergantung dari banyak sedikitnya hasil tangkapan yang diperoleh nelayan.

Saran dari penelitian yaitu pemerintah Kabupaten Tuban perlu lebih mengoptimalkan dalam pengadaan dan penggunaan fasilitas penunjang. Dinas Perikanan sebagai lembaga terkait perlu lebih mendengarkan aspirasi nelayan dan bakul serta mengadakan pembinaan secara berkala kepada pihak TPI, nelayan, dan bakul. Pihak TPI harus lebih tegas dalam menegakkan aturan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



KATA PENGANTAR

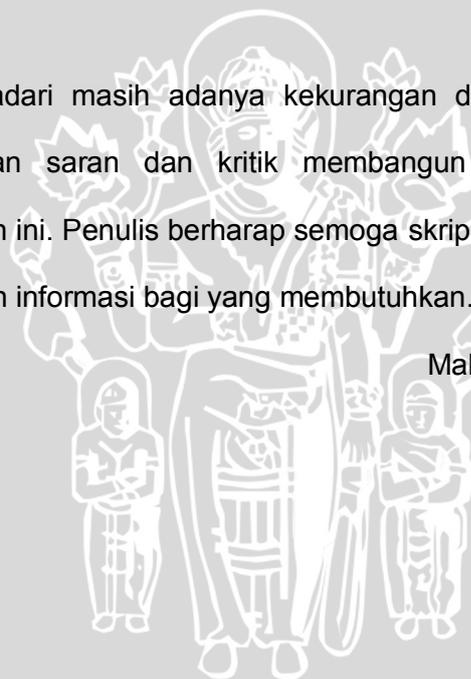
Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT dan junjungan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat rahmat dan hidayahnyalah penulis diberikan kesehatan selalu dan kesempatan untuk menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat kelulusan bagi para mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya Malang.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan proposal serta dalam pembuatan Laporan Skripsi ini.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan dalam tulisan ini, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik membangun untuk penulis demi kesempurnaan laporan ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan informasi bagi yang membutuhkan.

Malang, 15 Agustus 2016

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
RINGKASAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan	6
1.4. Kegunaan Penelitian	6
2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Definisi Pemasaran	7
2.2 Tempat Pelelangan Ikan	8
2.3 Retribusi	10
2.4 Hubungan Nelayan dan Tengkulak	12
2.5 Pendapatan Nelayan	14
2.6 Kemiskinan	16
2.7 Kebijakan Pemerintah	18
2.8 Penelitian Terdahulu	19
2.9 Kerangka Pemikiran	21
3. METODE PENELITIAN	23
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	23
3.2 Metode Penelitian	23
3.3 Metode Penentuan Sampel	24
3.3.1 Nelayan	24
3.3.2 Pedagang/Bakul Ikan	25
3.3.3 Karyawan TPI	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data	27
3.4.1 Observasi	27
3.4.2 Wawancara	27
3.4.3 Dokumentasi	28
3.4.4 Triangulasi	28

3.5 Metode Analisis Data.....	29
3.5.1 Analisis Deskriptif Kualitatif	29
3.5.2 Analisis Pendapatan Nelayan.....	31
4. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN	33
4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian.....	33
4.1.1 Kondisi Geografis dan Keadaan Topografi Desa.....	33
4.1.2 Keadaan Iklim	34
4.1.3 Keadaan Penduduk.....	34
4.2 Keadaan Umum Perikanan.....	36
4.2.1 Nelayan	36
4.2.2 Armada Penangkapan	38
4.2.3 Jenis dan Jumlah Alat Tangkap	38
4.2.4 Jenis dan Jumlah Produksi Ikan	38
5. HASIL DAN PEMBAHASAN	40
5.1 Profil TPI Bulu	40
5.1.1 Sejarah Perkembangan TPI Bulu	40
5.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan TPI Bulu	41
5.1.3 Fasilitas Pokok dan Fasilitas Penunjang TPI Bulu	42
5.1.4 Kegiatan Perikanan TPI Bulu.....	45
5.1.5 Struktur Organisasi TPI Bulu	47
5.2 Peranan TPI Dalam Pelaksanaan Penjualan Ikan Hasil Tangkapan.....	49
5.2.1 Proses Pelelangan Ikan di TPI	49
5.2.2 Pemungutan Retribusi	54
5.3 Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Ikan Melalui TPI dan di Luar TPI.....	59
5.3.1 Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Melalui TPI.....	59
5.3.2 Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli di luar TPI	61
5.4 Harga Jual dan Penerimaan Nelayan Melalui TPI dan di Luar TPI	63
5.4.1 Harga Jual Ikan melalui TPI dan di Luar TPI.....	63
5.4.2 Penerimaan Nelayan yang Menjual Hasil Tangkapan Melalui TPI ...	65
5.4.3 Penerimaan Nelayan yang Menjual Hasil Tangkapan di luar TPI.....	75
6. KESIMPULAN DAN SARAN	87
6.1 Kesimpulan	87
6.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

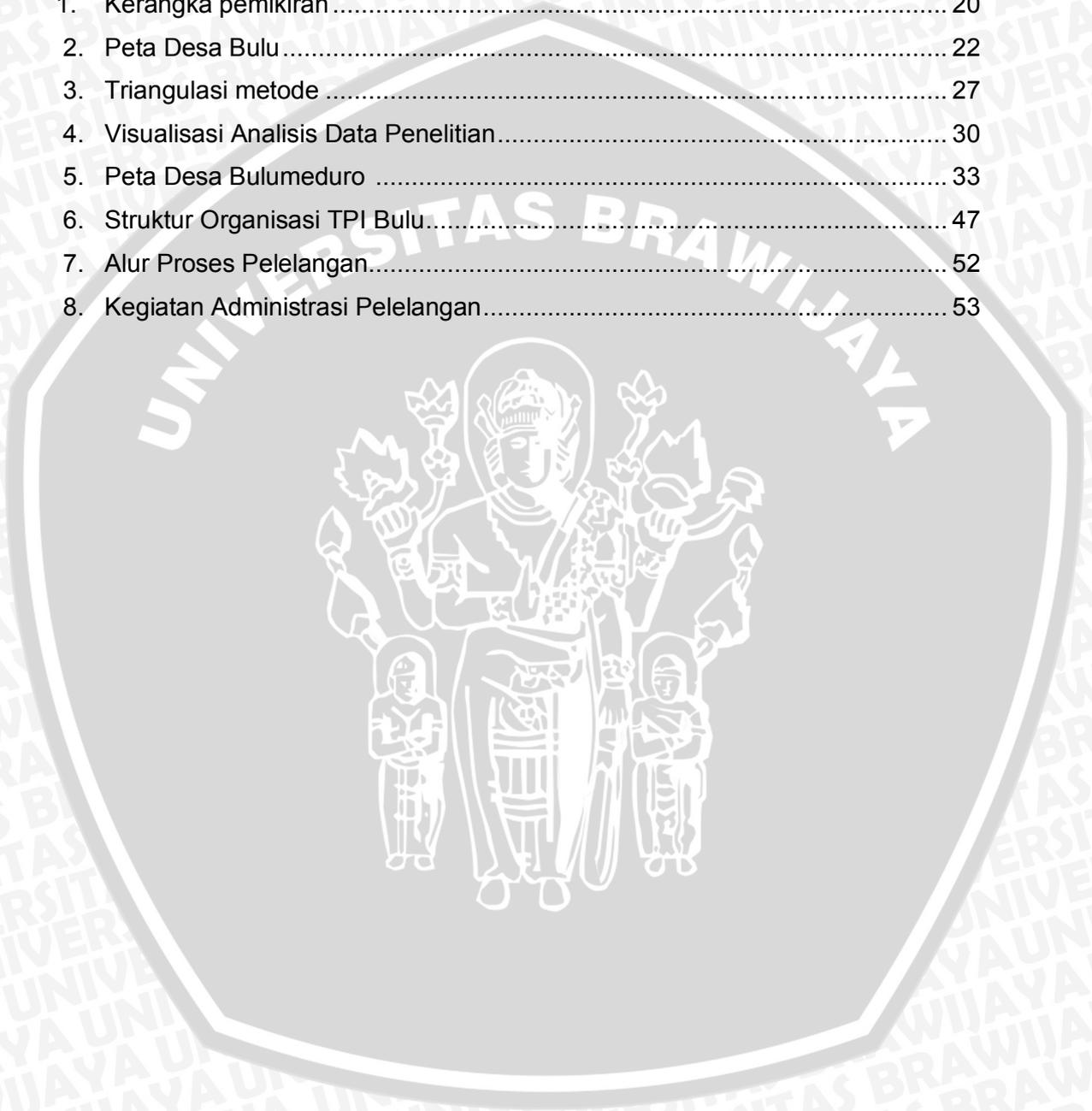
Tabel	Halaman
1. Perkembangan Produksi Perikanan Berdasarkan Cabang Usaha	2
2. Daftar Nama Informan Nelayan.....	24
3. Daftar Nama Informan Pedagang/ Bakul.....	24
4. Data penduduk Desa Bulumeduro berdasarkan jenis kelamin	35
5. Data penduduk Desa Bulumeduro berdasarkan tingkat pendidikan	35
6. Prasarana pendidikan Formal di Desa Bulumeduro	36
7. Struktur Mata Pencaharian Penduduk Desa Bulumeduro	36
8. Daftar Nelayan di Desa Bulumeduro	37
9. Jumlah Armada Penangkapan di Desa Bulumeduro	37
10. Jenis dan Jumlah Alat Tangkap yang Beroperasi.....	38
11. Jenis Ikan Tangkapan Nelayan	39
12. Fasilitas Fungsional TPI Bulu.....	42
13. Fasilitas Penunjang di TPI Bulu	45
14. Status dan tugas karyawan TPI Bulu	48
15. Perbandingan Perbup 52 Tahun 2014	58
16. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Ikan Melalui TPI	59
17. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Ikan di Luar TPI.....	61
18. Jenis ikan dan harga jual melalui TPI dan di luar TPI.....	64
19. Persentase jumlah nelayan yang menjual ikan di TPI dan di luar TPI	64
20. Modal tetap unit penangkapan <i>purse seine</i>	66
21. Komponen biaya tetap unit penangkapan <i>purse seine</i>	67
22. Biaya variabel unit penangkapan <i>purse seine</i>	68
23. Total penerimaan unit penangkapan <i>purse seine</i> selama satu bulan	69
24. Modal tetap unit penangkapan payang gardan	71
25. Komponen biaya tetap unit penangkapan payang gardan.....	72
26. Biaya variabel unit penangkapan payang gardan.....	73
27. Total penerimaan unit penangkapan payang gardan selama satu bulan	74
28. Modal tetap unit penangkapan gill net.....	76
29. Komponen biaya tetap unit penangkapan gill net.....	77
30. Biaya variabel unit penangkapan gill net	78
31. Total penerimaan unit penangkapan gill net selama satu bulan	78
31. Modal tetap unit penangkapan "othok"	81

32. Komponen biaya tetap unit penangkapan “othok”	82
33. Biaya variabel unit penangkapan “othok”	82
34. Total penerimaan unit penangkapan “othok” selama satu bulan	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka pemikiran	20
2. Peta Desa Bulu	22
3. Triangulasi metode	27
4. Visualisasi Analisis Data Penelitian	30
5. Peta Desa Bulumeduro	33
6. Struktur Organisasi TPI Bulu	47
7. Alur Proses Pelelangan	52
8. Kegiatan Administrasi Pelelangan	53



1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Jawa Timur memiliki kawasan laut hampir empat kali luas daratannya dengan garis pantai kurang lebih 2.916 km. Batas Provinsi Jawa Timur yakni perairan Laut Jawa dan Selat Karimata di sebelah utara, Selat Bali di sebelah timur, Samudera Hindia di sebelah selatan, dan Provinsi Jawa Tengah di sebelah barat. Sumberdaya ikan yang melimpah di laut dan budidaya ikan di darat seharusnya dapat menopang ketahanan pangan masyarakat. Wilayah pesisir dan lautan berpotensi menjadi sektor wisata bahari. Sektor perikanan dan kelautan dapat menjadi sumber ekonomi jika dikelola dengan baik dan menjadi sumber kehidupan masyarakat (DKP, 2013).

Berdasarkan UU No 31 tahun 2004, disebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk membangun dan membina prasarana perikanan (pelabuhan perikanan dan saluran irigasi tambak). Pemerintah sejak Pelita II telah membangun pelabuhan perikanan sampai sekarang berjumlah 594 buah pelabuhan perikanan yang terdiri dari 33 buah pelabuhan perikanan dan 561 buah pangkalan pendaratan ikan, dalam hal ini termasuk pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Kabupaten Tuban merupakan salah satu Kabupaten yang berada di pesisir pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur. Sebagai daerah yang berada pada area pantai dengan bentangan sepanjang 65 km yang meliputi lima kecamatan mulai Kecamatan Palang hingga Kecamatan Bancar membuat Kabupaten Tuban memiliki sumber daya alam laut yang beragam. Hasil perikanan Kabupaten Tuban dari tahun 2008 – 2011 cenderung mengalami

peningkatan berdasarkan laporan statistik perikanan Kabupaten Tuban oleh Dinas Perikanan dan Kelautan tahun 2013.

Tabel 1. Perkembangan Produksi Perikanan berdasarkan Cabang Usaha di Kabupaten Tuban Tahun 2008 - 2011

No	Uraian	Produksi (Ton)			
		2008	2009	2010	2011
1	Penangkapan Laut	10.824,88	10.875,62	10.993,68	11.355,04
	Perairan Umum	9.076,61	9.073,27	9.185,80	9.477,21
		1.766,27	1.802,35	1.807,88	1.877,83
2	Budidaya Tambak	7.063,16	7.785,32	8.956,28	10.068,44
	Sawah Tambak	2.249,71	2.433,89	2.763,80	3.381,46
	Kolam	4.655,88	5.172,16	5.945,54	6.039,95
	KJA	137,26	158,88	217,14	569,30
		20,31	22,39	29,80	77,73
	Jumlah	17.906,04	18.660,94	19.949,96	21.423,48

(Dinas Kelautan dan Perikanan, 2013)

Hasil produksi perikanan laut di Kabupaten Tuban yang terus mengalami peningkatan maka dapat dikatakan perikanan laut dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pemerintah daerah Kabupaten Tuban untuk mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya nelayan. Potensi produksi perikanan menunjukkan bahwa pengembangan sektor perikanan perlu mendapat perhatian (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2013).

Pemerintah berperan penting dalam mengupayakan pengembangan sektor perikanan. Salah satunya yaitu menyediakan fasilitas penunjang yang memberikan kemudahan dalam melakukan usaha perikanan. Kemudahan-kemudahan yang dimaksud yaitu kemudahan mendapatkan sarana produksi, mendaratkan hasil tangkapan, dan menjamin pemasaran sehingga proses produksi sampai pemasaran berlangsung dengan lancar. Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan sektor perikanan khususnya kegiatan penangkapan ikan adalah tersediannya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Laka, 2003).

Fungsi Pokok Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah sebagai prasarana pendukung aktivitas nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di

laut, penanganan dan pengolahan ikan hasil tangkap, dan pemasaran bagi ikan hasil tangkapan serta sebagai tempat untuk melakukan pengawasan kapal ikan. Berdasarkan fungsi tersebut, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh TPI ini adalah pelayanan yang diberikan diharapkan produktivitas kapal dan pendapatan nelayan akan meningkat (Laka, 2003).

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dibangun pertama kali di Jawa Timur pada tahun 1971 di Puger (Jember) dan Panarukan (Situbondo). Lokasi dibangunnya TPI yaitu pada pusat-pusat Pendaratan Ikan (PPI) dan pada pusat sentra budidaya. Sampai tahun 1984 terdapat 52 TPI tersebar di 21 kota Madya/Kabupaten (Susilo, 1986). Tetapi masih banyak permasalahan yang terjadi karena nelayan tidak memanfaatkan secara optimal keberadaan TPI, hal ini bisa saja terjadi karena nelayan tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh TPI, dan adanya ikatan perjanjian yang dilakukan antara nelayan dengan bakul ikan.

Kabupaten Tuban memiliki beberapa Pusat Pendaratan Ikan (PPI) yaitu PPI Bulu, PPI Karangagung, PPI Palang, PPI Tambakboyo serta PPI Jenu. Terdapat beberapa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yaitu TPI Tuban, TPI Kingking, dan TPI Glondonggede (Sutami, 2012).

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu fasilitas fungsional yang disediakan di setiap Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan bagian dari pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Kecamatan Bancar memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terletak di Desa Bulu yang didirikan pada tahun 1986. Alasan didirikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, peningkatan pembangunan, pelayanan untuk masyarakat, meningkatkan penyediaan ikan yang bermutu, dan meningkatkan nilai jual ikan segar agar meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan. Pada tanggal 3 Juni 2014 TPI bulu yang

baru yang berada tepat di sisi TPI lama telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur, bangunan seluas 800 m² itu berdiri diatas tanah milik negara dan dikelola langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Tuban dengan membentuk Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) DKP Bancar. Tempat Pelelangan Ikan Bulu dalam melaksanakan proses pelelangan ikan menggunakan sistem lelang murni, dimana juru lelang menyebutkan harga yang akan terus meningkat sehingga hanya ada satu calon pembeli yang setuju. Dari hasil pelelangan, pembeli akan membayar biaya retribusi sebesar 2,5% dari nilai lelang dan nelayan akan menerima hasil penjualan yang telah dikurangi biaya retribusi sebesar 2,5% dan hasil pungutan retribusi sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Tuban (PERDA Kabupaten Tuban Nomor 12, 2015).

Produksi ikan dan harga ikan dipengaruhi oleh musim. Pada musim ikan harga ikan akan menurun karena ikan hasil tangkapan melimpah, sebaliknya pada musim paceklik ikan hasil tangkapan menurun sedangkan permintaan tetap. Kenaikan atau penurunan hasil penjualan nelayan akan sangat mempengaruhi nilai retribusi yang dibayarkan oleh nelayan kepada pengelola pelelangan ikan.

Menurut Lubis (2006), bagian dari retribusi sering tidak diketahui oleh nelayan sehingga mustahil untuk didapatkannya kembali. Di banyak pelabuhan perikanan, nelayan sulit untuk mendapatkan bantuan dari pihak KUD sebagai pihak pengelola pelelangan ikan pada saat para nelayan membutuhkan biaya operasional melaut dan ketika musim paceklik. Para nelayan seharusnya dapat menerima bantuan tersebut dari pihak KUD yang bersangkutan pada saat musim paceklik dan nelayan mendapatkan asuransi yang berasal dari biaya retribusi yang dikeluarkan oleh para nelayan dari transaksi pelelangan ikan bila terjadi suatu kecelakaan di laut maupun di darat.

Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) penting untuk meningkatkan pendapatan nelayan dan jaminan kesejahteraan. Sehingga perlu dilakukan penelitian tentang “peranan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bulu Desa Bulu Meduro Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, Jawa Timur” sehingga dapat mengetahui peranan TPI terhadap pendapatan nelayan.

1.2 Rumusan Masalah

TPI memegang peranan penting di dalam membantu pemasaran hasil perikanan. Namun kenyataannya hal itu tidak memberikan rasa untung bagi semua orang, nelayan yang memperoleh hasil tangkapan ikan sedikit umumnya enggan menjual ikan hasil tangkapannya melalui TPI karena keuntungan mereka menjadi semakin kecil setelah dipotong retribusi. Sedangkan manfaat dari dana paceklik tidak terlalu mereka harapkan, karena datangnya selalu terlambat dan mengurusnya tidak mudah (Mubyarto, 1984).

Pentingnya peranan TPI disadari oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, hal ini dibuktikan salah satunya dengan pembangunan TPI pada Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Tetapi apakah harapan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dapat terlaksana dengan baik atau tidak. Oleh karena itu, perlu diadakan suatu kajian tentang peranan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam penjualan ikan hasil tangkapan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) bulu Desa Bulu Meduro Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Profil dan kegiatan perikanan yang ada di TPI Bulu?

2. Bagaimanakah peranan TPI dalam melaksanakan penjualan ikan hasil tangkapan nelayan?
3. Apa sajakah kelebihan dan kekurangan jual beli ikan melalui TPI dan di luar TPI?
4. Bagaimanakah pendapatan nelayan yang menjual ikan melalui TPI dan di luar TPI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis profil dan kegiatan perikanan yang ada di TPI Bulu.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis peranan TPI dalam pelaksanaan penjualan ikan hasil tangkapan.
3. Menganalisis kelebihan dan kekurangan jual beli ikan melalui TPI dan di luar TPI Bulu.
4. Menganalisis pendapatan nelayan yang menjual ikan melalui TPI dan di luar TPI.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Peneliti dan Lembaga akademis
Sebagai informasi untuk menambah pengetahuan keterampilan serta sebagai pedoman untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai kegiatan pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan di TPI Bulu.
2. Pemerintah
Sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam menentukan strategi pengembangan pengelolaan TPI Bulu di Kabupaten Tuban.
3. Nelayan

Membantu nelayan dalam menjual ikan di TPI Bulu sehingga dapat meningkatkan nilai jual ikan hasil tangkapan nelayan.



2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemasaran

Istilah pemasaran menurut Mubyarto (1995), diartikan sama dengan tataniaga atau distribusi, yaitu suatu macam kegiatan ekonomi yang berfungsi untuk membawa ataupun menyampaikan barang dari produsen sampai kepada tangan konsumen.

Menurut Kasmir dan Jakfar (2003), pasar dan pemasaran merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pasar dan pemasaran memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Pasar tanpa adanya pemasaran maka tidak ada artinya, demikian pula pemasaran tanpa pasar juga tidak berarti. Setiap ada kegiatan pasar selalu diikuti oleh pemasaran dan setiap kegiatan pemasaran adalah untuk mencari atau menciptakan pasar. Untuk menunjang kegiatan pemasaran khususnya pemasaran usaha perikana seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 bahwasanya Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran usaha perikanan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Konsep inti pemasaran yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan; produk; nilai, biaya, dan kepuasan; pertukaran, transaksi, dan hubungan; pasar pemasaran serta pemasar (Kotler, 1995).

Pemasaran mempunyai peranan sangat menentukan karena pemasaran merupakan perantara antara produsen dan konsumen. Pemasaran merupakan suatu urutan kegiatan yang saling berkaitan erat dan bertujuan untuk

memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia melalui proses pertukaran. Dengan demikian sebuah perusahaan dalam menjalankan usahanya perlu memperhatikan dan mengembangkan sistem pemasarannya (Danfar, 2009).

Di dalam sistem pemasaran diperlukan pelaksanaan fungsi-fungsi pemasaran. Menurut Hanafiah dan Saefudin (2010), fungsi pemasaran merupakan suatu proses pertukaran yang mencakup serangkaian kegiatan yang tertuju untuk memindahkan barang-barang atau jasa-jasa dari sektor produksi ke sektor konsumsi. Fungsi pemasaran dapat diklasifikasikan menjadi:

- Fungsi pertukaran
 - Fungsi penjualan
 - Fungsi pembelian
- Fungsi fisik
 - Fungsi pengangkutan
 - Fungsi penyimpanan
 - Fungsi pemrosesan
- Fungsi penyediaan sarana
 - Pembiayaan
 - Penanggulangan resiko
 - Standarisasi
 - Informasi pasar



2.2 Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

TPI jika ditinjau dari manajemen operasi, maka TPI merupakan tempat penjual jasa pelayanan antara lain sebagai tempat pelelangan, tempat perbaikan jaring, tempat perbaikan mesin dan lain sebagainya. Disamping itu TPI merupakan tempat berkumpulnya nelayan dan pedagang-pedagang ikan atau pembeli ikan dalam rangka mengadakan transaksi jual beli ikan. Nelayan ingin

menjual hasil tangkapan ikannya dengan harga sebaik mungkin, sedangkan pembeli ingin membeli dengan harga serendah mungkin. Untuk mempertemukan penawaran dan permintaan itu, diselenggarakan pelelangan ikan agar tercapai harga yang sesuai, sehingga masing-masing pihak tidak merasa dirugikan (Hidayatullah, 2013).

Tempat Pelelangan Ikan (TPI), selain merupakan pintu gerbang bagi nelayan dalam memasarkan hasil tangkapannya, juga menjadi tempat untuk memperbaiki jaring, motor, serta kapal dalam persiapan operasi penangkapan ikan. Tujuan utama didirikannya TPI adalah untuk menarik sejumlah pembeli sehingga nelayan dapat menjual hasil tangkapannya sesingkat mungkin dengan harga yang baik serta dapat menciptakan pasaran yang sehat melalui lelang murni. Secara fungsional, sasaran yang diharapkan dari pengelolaan TPI adalah tersediannya ikan bagi kebutuhan penduduk dengan kualitas yang baik serta harga yang wajar. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pengelolaan TPI yang baik dan professional akan memotivasi para nelayan untuk menambah dan mengembangkan usaha di bidang perikanan (Hidayatullah, 2013).

Peranan Tempat Pelelangan Ikan menurut perundangan yang berlaku tertuang dalam UU No 31 tahun 2004, disebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk membangun dan membina prasarana perikanan (pelabuhan perikanan dan saluran irigasi tambak). Pemerintah dalam hal ini berperan untuk menyediakan prasarana pendukung aktivitas usaha nelayan khususnya nelayan tangkap. Salah satu sarana pendukungnya adalah penyediaan Tempat Pelelangan ikan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2015, disebutkan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai bagian dari urusan pemerintah konkuren yaitu tergolong dalam urusan pemerintah pilihan.

Bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pelelangan ikan di Kabupaten Tuban sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir serta peningkatan pendapatan asli daerah maka perlu mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

Menurut Peraturan Bupati Tuban Nomor 52 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelelangan ikan, bahwasanya Kepala Dinas bertanggung jawab atas penyelenggaraan lelelangan ikan, penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh UPTD sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional dan UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.

Peran TPI Bulu diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat khususnya nelayan, karena dengan adanya TPI, harga ikan dapat stabil, dan tanpa adanya kecurangan dari pihak TPI maupun bakul. Karena tujuan didirikannya TPI adalah sebagai institusi perantara yang berperan untuk mendapatkan pembeli potensial sebanyak mungkin guna menjual hasil tangkapan nelayan dengan harga tinggi, tanpa merugikan pedagang pengepul. Selain itu didirikannya TPI dimaksudkan pula agar nelayan mendapatkan harga pembayaran secara tunai atas harga yang wajar, disamping sebagai pendapatan daerah.

A. Pelelangan Ikan

Pelelangan ikan diselenggarakan oleh penyelenggara lelang secara terbuka diantara penjual dan pembeli yang dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah dan diharapkan akan dapat menguntungkan kedua belah pihak baik nelayan maupun tengkulak. Lembaga pelelangan merupakan lembaga yang membantu nelayan dalam memasarkan ikan hasil tangkapannya melalui pelelangan, disamping sebagai tempat pemungutan retribusi hasil tangkapan sekaligus sebagai pengendali harga (Yustiarani, 2008).

Secara umum pelelangan ikan diartikan sebagai suatu metode transaksi di pusat produksi yang diselenggarakan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) antar nelayan dan bakul dengan tujuan agar dapat diperoleh harga yang wajar serta pembayaran secara tunai kepada nelayan. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat. Bakul adalah pemenang lelang di TPI (Perda Nomor 08 Tahun 2011 Kabupaten Tuban).

Dalam mekanisme lelang di TPI Bulu, dilakukan penawaran harga ikan secara terbuka kepada para calon pembeli dengan lelang murni, penawaran sesuai dengan harga standar pasar. Penentuan pemenang lelang yaitu penawar terakhir dengan penawaran tertinggi yang berhak mendapatkan ikan yang dilelang, kemudian pemenang lelang mendapatkan karcis lelang dari juru tulis yang kemudian harus segera menyetorkan uang pembelian ikan serta beserta karcis lelang kepada kasir (Harian Bulu, 2014).

2.3 Retribusi

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ada beberapa jenis retribusi, diantaranya : retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Undang-Undang No. 34/2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah No. 66/2001 tentang Retribusi Daerah, maka retribusi TPI merupakan jenis dari retribusi jasa usaha (Sutami, 2012).

Pemungutan retribusi lelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban tertuang dalam Perbup No. 49 tahun 2014 BAB IV pasal 5 tentang struktur dan besarnya tarif yang berbunyi:

1. Setiap pengguna tempat pelelangan dikenakan retribusi

2. Besarnya tarif retribusi untuk pelayanan penyelenggaraan pelelangan di tempat pelelangan ikan ditetapkan dari harga transaksi penjualan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dipungut dari nelayan/petani ikan (penjual)
 - b. Sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dipungut dari pedagang/bakul (pembeli) ikan.

Dalam upaya peningkatan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan nelayan, serta untuk menciptakan harga yang layak bagi konsumen sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semua hasil penangkapan ikan di laut perlu dijual secara lelang di tempat pelelangan ikan (TPI). Pelaksanaan pelelangan ikan dapat menciptakan kepastian pasar dan harga ikan yang layak bagi nelayan maupun konsumen, pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Fungsi retribusi pelelangan ikan secara langsung adalah sebagai pemasukan pendapatan bagi kas daerah dan pendapatan bagi pihak yang berperan sebagai penyelenggara pelelangan ikan dan secara tidak langsung adalah untuk mensejahterakan para nelayan, karena pada saat nelayan melaksanakan pelelangan ikan, mereka membayar retribusi, dan retribusi itulah yang nantinya akan kembali lagi ke mereka dalam bentuk bantuan dana sosial.

2.4 Hubungan Nelayan dan Tengkulak

Secara umum nelayan diartikan sebagai orang yang mata pencahariannya menangkap ikan di laut, sedangkan tengkulak adalah orang yang membeli ikan hasil tangkapan yang diperoleh nelayan. Selain sebagai orang yang membeli hasil tangkapan nelayan, tengkulak juga berfungsi sebagai pemberi bantuan jaminan uang kepada nelayan, baik untuk modal dalam kegiatan kenelayanan maupun untuk kehidupan sehari-hari (Imron, 2000).

Tengkulak merupakan instrumen sosial ekonomi yang penting dalam menjaga kelangsungan usaha perikanan nelayan, seperti kasus di Palang, Tuban, langkah kreatif tengkulak untuk mencari pangsa pasar baru ternyata berimplikasi terhadap pengurangan intensitas konflik nelayan trawl dengan nelayan tradisional (Kusnadi, 2004).

Terdapat hubungan yang erat dan hubungan yang saling menguntungkan antara nelayan dengan tengkulak, dimana terjadi jalinan utang – piutang antara tengkulak dengan nelayan. Para nelayan diberikan bantuan modal untuk melaut dan biasanya hutang perbekalan melaut itu biasanya dibayarkan oleh nelayan dalam bentuk hasil tangkapan yang diperoleh oleh nelayan, dan pihak tengkulak mendapatkan keuntungan dari harga beli ikan yang lebih rendah dari nelayan yang diberikan pinjaman modal. Pada musim paceklik dipastikan utang nelayan tidak akan dikembalikan karena pada musim tersebut hampir semua nelayan tidak melaut (Kusnadi, 2004).

Hubungan antara nelayan dengan tengkulak tidak selamanya merugikan nelayan, namun ada juga yang terbentuk mutualisme yaitu saling menguntungkan kedua belah pihak. Dimana seorang tengkulak melakukan kesepakatan dengan nelayan, tengkulak memberikan modal kepada nelayan akan melaut dengan syarat ikan hasil tangkapan harus dijual kepadanya, dimana 80% hasil tangkapan untuk tengkulak, 20% untuk nelayan, dan nelayan juga tidak merasa terpaksa menjual ikan hasil tangkapannya (Mubyarto, 1995).

Peranan tengkulak akan tetap berpengaruh bagi nelayan, sepanjang kehadiran TPI/KUD mina tidak memberi kemudahan dan keringanan usaha nelayan. Lembaga – lembaga pemerintah juga tidak memiliki tingkat kreativitas yang tinggi sebagaimana ditemukan pada tengkulak (Kusnadi, 2004).

2.5 Pendapatan Nelayan

Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan atau binatang air lainnya. Orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat atau perlengkapan ke dalam kapal atau perahu tidak termasuk dalam kategori nelayan (Yustiarani, 2008).

Berdasarkan sumber pendapatannya, nelayan dapat dibagi menjadi 4 yaitu (Hidayatullah, 2013):

1. Nelayan tetap atau nelayan penuh, yakni nelayan yang pendapatan seluruhnya berasal dari perikanan.
2. Nelayan sambilan utama, yakni nelayan yang sebagian besar pendapatannya berasal dari perikanan.
3. Nelayan sambilan tambahan, yakni nelayan yang sebagian kecil pendapatannya berasal dari perikanan.
4. Nelayan Musiman, yakni orang yang dalam musim-musim tertentu saja aktif sebagai nelayan.

Faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan adalah produksi melaut, curahan waktu kerja produktif, dan biaya produksi atau biaya operasional melaut. Faktor yang berpengaruh terhadap kenaikan produksi melaut adalah aset kapal, jenis alat tangkap, mutu SDM, harga ikan, daerah penangkapan ikan, dan pengembangan usaha pasca panen dalam rumah tangga. Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap penurunan produksi hasil penangkapan ikan adalah bahan bakar minyak (BBM). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap biaya melaut adalah aset kapal, alat tangkap, mutu hasil, dan mutu SDM.

Berdasarkan perahu/kapal penangkap yang digunakan, nelayan dapat dibagi menjadi:

1. Nelayan berperahu tak bermotor, terdiri dari:
 - a) Nelayan Jukung
 - b) Nelayan perahu papan (kecil, sedang dan besar)
2. Nelayan berperahu motor tempel
3. Nelayan berkapal motor, menurut GT (Gross Ton) terdiri dari:
 - a) < 5 GT
 - b) 5 – 10 GT
 - c) 10 – 20 GT
 - d) 20 – 30 GT
 - e) 30 – 50 GT
 - f) 50 – 100 GT
 - g) 100 – 200 GT
 - h) 200 – 500 GT
 - i) > 500 GT

Menurut statusnya, nelayan dapat dibagi menjadi:

1. Nelayan Pemilik, terbagi menjadi nelayan pemilik perahu tak bermotor, dan nelayan pemilik kapal motor yang sering disebut toke.
2. Nelayan Juragan, adalah pengemudi pada perahu bermotor atau sebagai kapten kapal motor.
3. Nelayan buruh, adalah pekerja penangkap ikan pada perahu motor atau pada kapal motor.

Pendapatan nelayan berasal dari dua sumber, yaitu: pendapatan dari usaha penangkapan ikan dan pendapatan dari luar usaha penangkapan ikan.

Sumber pendapatan utama bagi nelayan berasal dari usaha penangkapan ikan sedangkan pendapatan dari luar usaha penangkapan ikan, biasanya lebih rendah (Sayogyo dalam Yustiarani, 2008)

2.6 Kemiskinan

Pendapat mengenai kemiskinan sangat beragam. Beberapa mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kemiskinan juga diartikan sebagai ketidakberdayaan sekelompok masyarakat dibawah suatu sistem pemerintah yang menyebabkan mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplorasi.

Dalam pandangan Satria (2002), kategorisasi kemiskinan dilakukan berdasarkan faktor-faktor penyebab kemiskinan. Ada dua aliran besar yang melihat faktor-faktor penyebab kemiskinan. Pertama, aliran modernisasi yang selalu menganggap persoalan kemiskinan disebabkan faktor internal masyarakat. Dalam aliran ini, kemiskinan nelayan terjadi sebagai akibat faktor budaya (kemalasan), keterbatasan modal, dan teknologi, keterbatasan manajemen, serta kondisi sumberdaya alam. Kedua, aliran struktural yang selalu menganggap faktor eksternal sebagai penyebab kemiskinan nelayan.

Kemiskinan struktural dapat terjadi akibat, pertama, kemiskinan sebagai korban pembangunan. Contohnya, penggusuran akibat kegiatan pembangunan lapangan golf ataupun *real estate*. Kedua, kemiskinan terjadi karena golongan tertentu tidak memiliki akses terhadap kegiatan ekonomi produktif akibat pola institusional yang diberlakukan. Aspek struktural lain adalah lemahnya posisi nelayan dan pembudidaya ikan dalam pemasaran. kelemahan posisi tersebut menyebabkan margin keuntungan pemasaran lebih banyak jatuh ke pedagang dan bukan ke nelayan ataupun pembudidaya ikan (Satria, 2002).

Kusnadi (2003), menambahkan bahwa kemiskinan nelayan disebabkan dua kategori yang saling melengkapi dan saling berinteraksi. Kategori pertama adalah internal yang berkaitan dengan kondisi internal sumber daya dan aktivitas kerja mereka. Kategori ini mencakup beberapa masalah, diantaranya 1).

Keterbatasan kualitas SDM nelayan, 2). Keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan, 3). Hubungan kerja (pemilik perahu-nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh, 4). Kesulitan melakukan usaha diversifikasi usaha penangkapan, 5). Ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut, 6). Gaya hidup yang dianggap boros dan kurang berorientasi ke masa depan.

Kategori kedua adalah kategori eksternal yang mencakup masalah: 1). Kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi produktivitas untuk menunjang ekonomi nasional dan parsial, 2). sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara, 3). kerusakan ekosistem pesisir laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktik penangkapan dengan bahan kimia, perusakan terumbu karang, dan konservasi hutan bakau di kawasan pesisir, 4). Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, 5). Penegakan hukum yang lemah terhadap perusakan lingkungan, 6). Terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pascapanen, 7). Terbatasnya peluang kerja di sektor nonperikanan yang tersedia di desa-desa nelayan.

Kemiskinan nelayan merupakan masalah serius yang harus menjadi perhatian dan tanggung jawab semua pihak. Nelayan yang hidup di desa-desa pesisir yang perairannya sudah dalam kondisi tangkap lebih (*overfishing*) akan menghadapi tekanan-tekanan sosial ekonomi yang lebih berat daripada nelayan yang hidup di desa-desa pesisir yang kondisi sumberdaya perikanannya masih potensial. Aspek-aspek lingkungan, keragaman potensi sumberdaya ekonomi lokal, peluang pasar, kualitas sumber daya manusia nelayan, dan sebagainya akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas kemiskinan nelayan. Akibatnya, penanganan kemiskinan nelayan juga bukan merupakan masalah yang sederhana (Kusnadi, 2003).

Menurut Kusnadi (2003), bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan tidak hanya terbatas pada aspek pengelolaan sektor perikanan semata tetapi juga harus diintegrasikan dengan kegiatan ekonomi lainnya, pelestarian lingkungan, peranan wanita, dan penguatan kelembagaan masyarakat.

2.7 Kebijakan Pemerintah

Kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam memilih tujuan dan cara untuk memilih tujuan itu. Dan pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya (Budiarjo 2008). Kebijakan adalah suatu rangkaian atau tindakan tertentu yang berisi keputusan-keputusan untuk dijalankan atau diikuti oleh perseorangan, kelompok, maupun negara yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang telah ada untuk mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan secara nasional diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sekaligus memelihara daya dukungnya, beberapa kebijakan ditujukan untuk pembangunan usaha perikanan tangkap (1) memperkuat dan mengembangkan usaha perikanan tangkap nasional secara efisien, lestari dan berbasis kerakyatan, (2) mengembangkan dan memperkuat penanganan industri pengolahan, dan pemasaran hasil (DKP, 2013),

Salah satu kebijakan pemerintah untuk membantu nelayan dalam pemasaran ikan hasil tangkapannya yaitu dengan adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Dengan dibangunnya sarana pemasaran ini diharapkan nelayan dapat dengan mudah menjual ikan hasil tangkapannya tanpa harus melalui pedagang perantara sehingga kekuatan tawar menawar dari nelayan dapat

semakin kuat dan harga jual ikan hasil tangkapan dapat sesuai dengan standar harga pasar.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

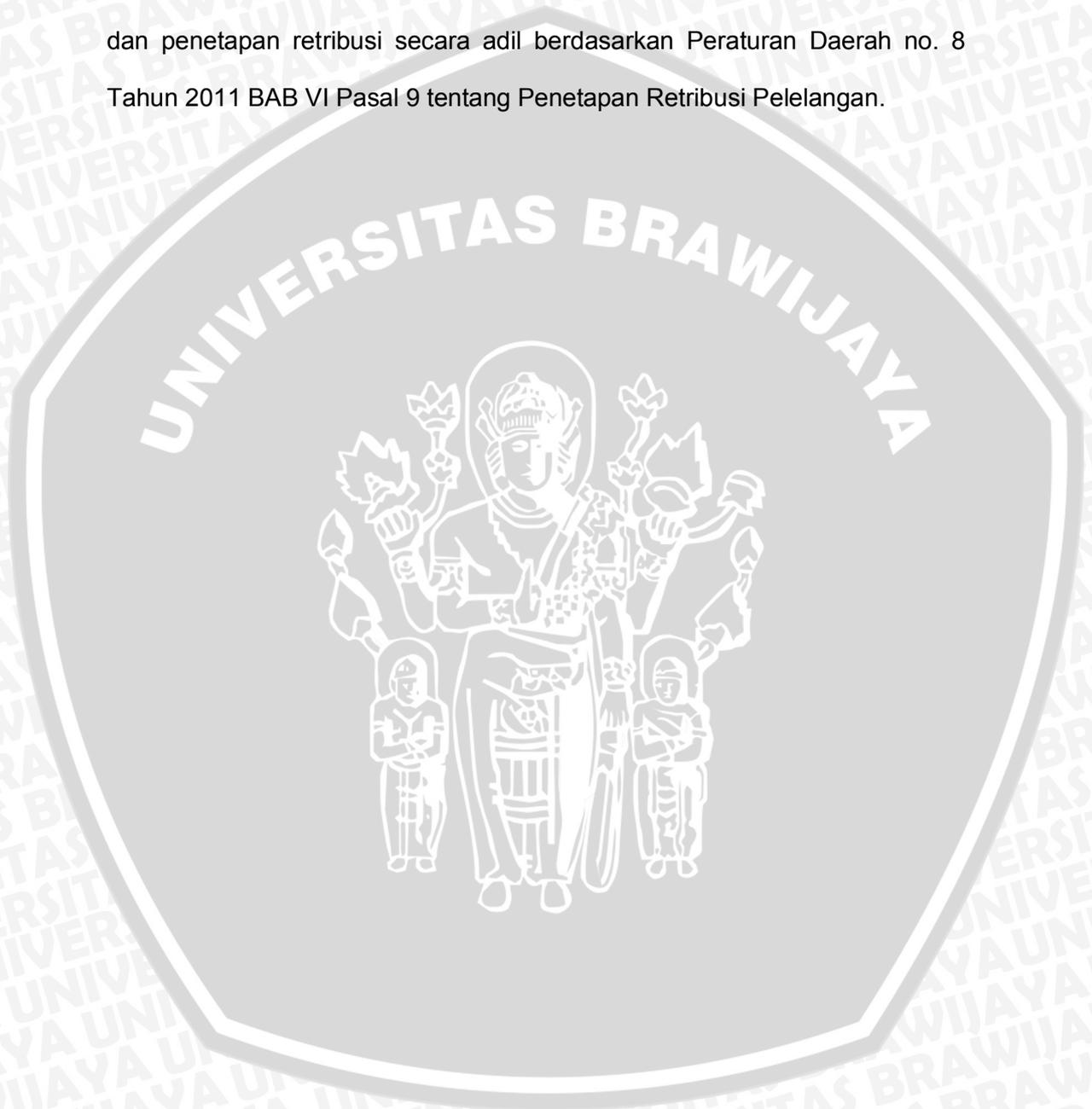
1. Penelitian Zaim Mukaffi (2004) yang berjudul "Peranan Tempat Pelelangan Ikan terhadap pendapatan nelayan di Pelabuhan Muncar", hasil analisa menggunakan uji beda dua rata-rata, penelitian ini menguji pendapatan nelayan yang menjual di TPI dan nelayan yang tidak menjual di TPI.

Kesimpulannya menyatakan bahwa ada perbedaan pendapatan antara nelayan yang menjual ikannya melalui fasilitas TPI maupun tidak. Dari aspek sosial-budaya terlihat bahwa masyarakat nelayan berkomunikasi satu sama lain dan mereka memperoleh informasi di TPI sehingga pada akhirnya akan merubah sikap dan perilaku ke arah yang lebih positif. Masyarakat nelayan sangat mendambakan terselenggaranya pelelangan ikan sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Penelitian Ari Sutami (2014), yang berjudul "Peran TPI Terhadap Proses Penjualan Ikan Bagi Nelayan dan Bakul Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Glondonggede Desa Glondonggede Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur" Peran TPI terhadap pelaksanaan jual beli hasil tangkapan ikan bagi nelayan dan bakul ikan meliputi proses kegiatan lelang, dan kegiatan administrasi. Dalam proses pelelangan nelayan (penjual) dipungut retribusi sebesar 4% dimana 1,5% untuk tabungan nelayan dan 2,5% untuk retribusi nelayan dari proses pelelangan sedangkan bakul (konsumen) dipungut retribusi sebesar 2,5%.

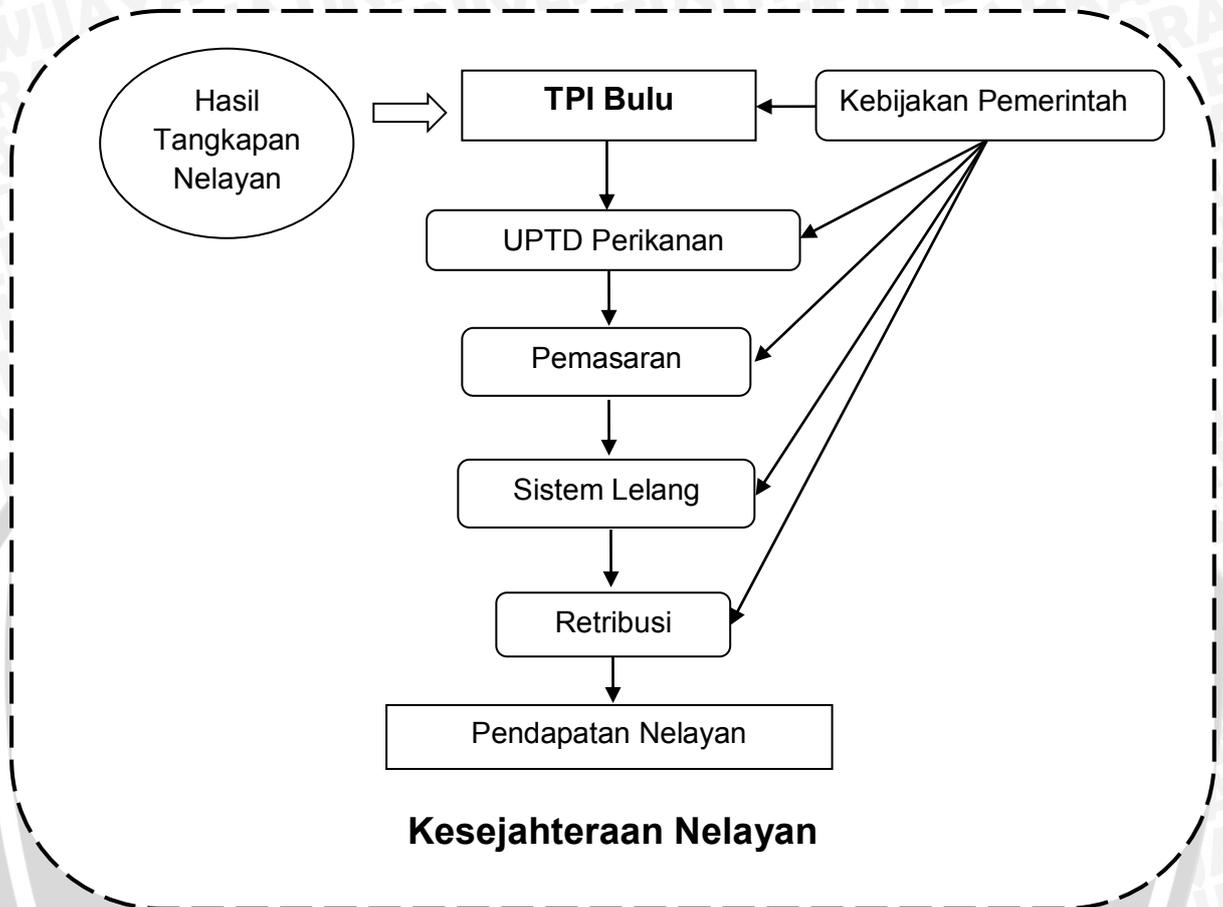
Dari peran TPI terhadap jual beli hasil tangkapan ikan dalam melayani nelayan dan bakul di TPI Glondonggede dapat dikatakan kurang berjalan,

diantaranya karena fasilitas yang ada di TPI Glondonggede masih belum operasional secara maksimal. Selain itu, kemudahan yang diberikan pihak TPI Glondonggede dalam melayani nelayan dan bakul di dalam proses pelelangan seperti simpan pinjam untuk nelayan, dan hutang untuk bakul dan penetapan retribusi secara adil berdasarkan Peraturan Daerah no. 8 Tahun 2011 BAB VI Pasal 9 tentang Penetapan Retribusi Pelelangan.



2.9 Kerangka Pemikiran

Berikut merupakan kerangka pemikiran penelitian disajikan pada gambar 2.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

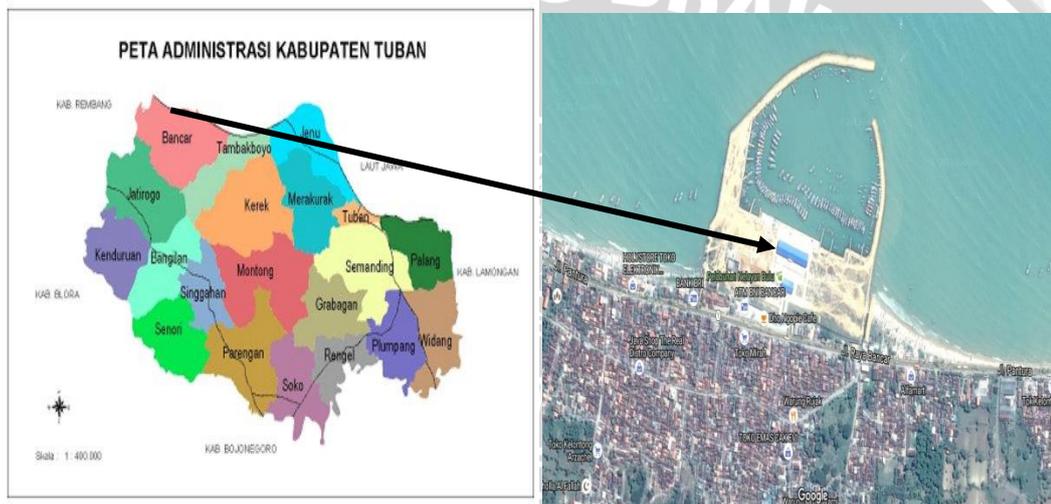
Nelayan Desa Bulu mendapatkan hasil tangkapan yang kemudian dijual melalui TPI Bulu, kemudian terjadi proses lelang untuk menentukan harga jual ikan tangkapan, harga terbentuk dari lelang murni. Para calon pembeli menawarkan hasil tangkapan nelayan tersebut dan penawar terakhir dengan harga tertinggi adalah yang menang. Pembeli ikan yang memenangkan lelang berhak mendapatkan hasil tangkapan tersebut dengan membayar sesuai dengan harga yang di menangkan pada saat lelang dan retribusi sesuai dengan ketentuan PERDA No.8 tahun 2011 Tentang Retribusi Hasil Pelelangan.

Kegiatan lelang di TPI Bulu diselenggarakan langsung oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban melalui UPTD Perikanan dibantu oleh seorang Administratur TPI. Namun pada kenyataannya, meskipun sudah ada TPI Bulu tetapi masih ada kegiatan jual beli di luar TPI yang dilakukan oleh nelayan dengan bakul ikan, hal ini dikarenakan hasil tangkapan nelayan yang sedikit, tarif retribusi yang tinggi, dan ikatan nelayan dengan pemilik modal (tengkulak). Dilihat dari status dan peranan masing-masing individu, dimana nelayan berperan sebagai produsen yaitu menangkap serta memasok ikan hasil tangkapan dan dijual ke TPI. Peran bakul ikan sebagai pembeli yang melakukan transaksi tawar-menawar dalam proses lelang. TPI berperan sebagai fungsi manajemen yaitu yang memfasilitasi nelayan dan bakul ikan dalam proses lelang. Kurangnya nelayan yang memanfaatkan TPI secara optimal akan mempengaruhi pendapatan nelayan dan kesenjangan sosial masyarakat di Desa Bulumeduro. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah diharapkan dapat terealisasi dengan baik dan kesejahteraan nelayan dapat meningkat.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bulu Desa Bulumeduro Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. Penelitian akan dilakukan pada bulan Mei 2016. Berikut merupakan peta Desa Bulu yang disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta Desa Bulu
(Sumber : <http://www.google.co.id>, 2016)

3.2 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut Yin (2009), metode studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang bersifat komprehensif, intens, rinci, dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer.

Studi Kasus digunakan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelelangan ikan, menjelaskan tentang seberapa

besar peran atau manfaat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) bagi nelayan, dan menjelaskan kekurangan maupun kelebihan TPI dalam melayani masyarakat nelayan di Desa Bulu. Penggunaan jenis penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam permasalahan khusus, sehingga diperoleh gambaran secara jelas dan lengkap mengenai masalah tersebut.

3.3 Metode Penentuan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu menentukan sampel dengan berbagai pertimbangan sebagai narasumber yang dianggap paling tahu dengan apa yang kita inginkan sehingga memudahkan untuk menjelajahi obyek yang diteliti (Sugiyono, 2011).

Purposive sampling dipilih melalui pertimbangan sesuai dengan tujuan penelitian dan lebih pada kehendak untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang sesuatu hal melalui wawancara secara mendalam. Sampel sumber data yang ditentukan dalam penelitian ini pada awalnya antara lain nelayan, pedagang atau bakul ikan, dan karyawan TPI.

3.3.1 Nelayan

Mencari data jumlah nelayan yang berasal dari Desa Bulumeduro, yang terbagi atas pemilik perahu dan pandega. Dari jumlah tersebut kemudian diambil sampel berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan di nelayan Desa Bulumeduro, yaitu purse seine, Payang gardan, gill net, dan pukot kantong (*othok*). Dari keempat macam alat tangkap yang digunakan nelayan tersebut kemudian akan diambil sampel nelayan yang dijadikan informan. Berikut adalah daftar nama informan nelayan yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar Nama Informan Nelayan
a) Yang Menjual di Dalam TPI

No	Nama	Waktu wawancara	Lokasi wawancara dan keterangan
1	Bapak Syaiful	05 Mei 2016	Di warung kopi dekat TPI
2	Bapak Maimun	05 Mei 2016	Di saung tempat sandar kapal
3	Bapak Sulaiman	05 Mei 2016	Di rumah Bapak Sulaiman
4	Bapak Majid	06 Mei 2016	Di warung kopi Cak Riyadi
5	Bapak Sukron	06 Mei 2016	Di warung kopi Cak Riyadi
6	Bapak Ainul Yaqin	06 Mei 2016	Di warung kopi Cak Riyadi

b) Yang Menjual di Luar TPI

No	Nama	Waktu Wawancara	Lokasi wawancara dan keterangan
1	Bapak Sarpan	07 Mei 2016	Tempat Pengepul ikan
2	Bapak Dariyo	07 Mei 2016	Tempat Pengepul ikan
3	Bapak Warsito	07 Mei 2016	Tempat Pengepul ikan
4	Bapak Tasmin	07 Mei 2016	Tempat Pengepul ikan
5	Bapak Katsuri	07 Mei 2016	Tempat Pengepul ikan
6	Bapak Sutono	07 Mei 2016	Tempat pendaratan ikan
7	Bapak Jumali	07 Mei 2016	Tempat Pengepul ikan
8	Bapak Matrukin	07 Mei 2016	Tempat Pengepul ikan
9	Bapak Kayi	07 Mei 2016	Tempat Pengepul ikan
10	Bapak Darji	07 Mei 2016	Tempat Pengepul ikan

3.3.2 Pedagang / Bakul Ikan

Pengambilan sampel pedagang / bakul ikan ditentukan dengan cara mencari data bakul atau pedagang yang terlibat dalam proses pelelangan maupun tanpa melalui proses pelelangan. Apabila informasi yang diperoleh sudah relatif homogen, maka jumlah sampel dianggap cukup, sampel yang diambil sebanyak 6 orang. Berikut merupakan daftar informan pedagang atau bakul yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Daftar Nama Informant Pedagang/Bakul

No	Nama	Waktu wawancara	Lokasi wawancara dan keterangan
1	Ibu Karsih	07 Mei 2016	Di rumah Ibu Karsih
2	Ibu Kustini	07 Mei 2016	Di TPI Bulu
3	Ibu Suwarni	07 Mei 2016	Di TPI Bulu
4	Ibu Sutinah	07 Mei 2016	Di TPI Bulu
5	Ibu Panut	07 Mei 2016	Di TPI Bulu
6	Ibu Prpto	07 Mei 2016	Di TPI Bulu

3.3.3 Karyawan TPI

Berikut adalah daftar nama pegawai dan karyawan TPI Bulu yang menjadi informan dalam penelitian.

a. UPTD Kecamatan Bancar

Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD merupakan pegawai negeri yang ditunjuk oleh pemerintah yang mempunyai tugas dan wewenang pada semua aktivitas dan kegiatan di Kecamatan pada bidang perikanan.

Di Kecamatan Bancar selaku UPTD yaitu Bapak Badrodin, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 04 Mei 2016 di kantor TPI Bulu.

b. Pihak Administratur TPI

Pencarian informasi dari pihak administratur TPI yaitu yang bersangkutan Bapak Sudarwito yang memberikan keterangan berupa kegiatan yang ada di TPI Bulu, pelayanan yang diberikan bagi nelayan dan masyarakat, data hasil tangkapan, serta retribusi pelelangan. Wawancara dilakukan pada tanggal 04 Mei 2016 di kantor TPI Bulu.

c. Juru lelang dan Juru karcis

Yaitu yang bersangkutan Bapak Sukardi dan Bapak Iswanto yang memberikan informasi pada tanggal 04 Mei 2016 di kantor TPI berupa proses pelelangan, penentuan harga lelang dan syarat – syarat mengikuti proses pelelangan.

d. Kasir

Yang bersangkutan yaitu Bapak Said dan Bapak Ervan yang memberikan informasi berupa proses transaksi pembayaran setelah mengikuti pelelangan, persen retribusi yang dikenakan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan triangulasi sumber data.

3.4.1 Observasi

Metode Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap situasi yang kompleks dan merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis yang mengutamakan pengamatan dan ingatan. Peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap suatu benda, kondisi atau situasi, proses atau perilaku (Sugiyono, 2011).

Observasi dilakukan secara menyeluruh terhadap obyek-obyek yang dianggap penting di dalam TPI maupun di luar TPI Bulu sehingga dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain. Peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan diperoleh pandangan secara holistik atau menyeluruh.

3.4.2 Wawancara

Menurut Sugiyono (2011) menyatakan bahwa wawancara bertujuan untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti akan mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang akan dikemukakan oleh informan.

Penelitian dilakukan dengan melakukan proses wawancara terarah untuk mendapatkan informasi yang tepat. Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya langsung atau wawancara kepada pihak atau instansi yang terkait dengan penelitian tersebut. Wawancara dilakukan kepada nelayan desa bulu yang menjual ikan melalui TPI maupun di luar TPI, bakul ikan, dan pihak pengelola TPI.

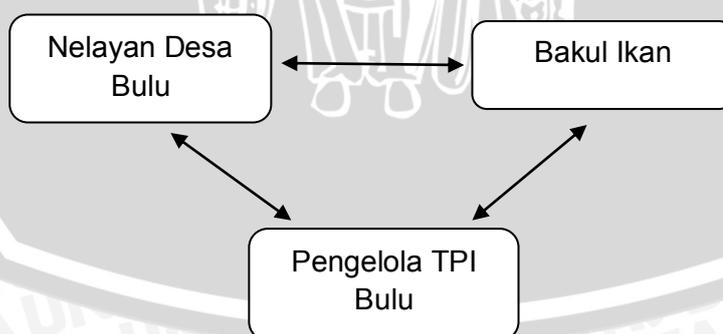
3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Penggunaan dokumen adalah untuk mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain. Teknik studi dokumentasi dilakukan dengan mengaitkan data primer yang diperoleh di lapang serta informasi-informasi yang diperoleh dari narasumber. Hasil penelitian akan lebih kredibel dengan didukung adanya data yang berhubungan dengan aktivitas TPI, data tentang nelayan, data tentang bakul ikan yang ikut lelang di TPI, data keadaan wilayah Desa Bulu dan data pemerintah Kabupaten Tuban tentang retribusi tempat pelelangan ikan.

3.4.4 Triangulasi

Menurut Sugiyono (2011) menyatakan bahwa triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber.

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi metode yang disajikan Gambar 3.



Gambar 3. Triangulasi metode

3.5 Metode Analisis Data

Untuk menjawab beberapa tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dalam hal ini dipergunakan metode analisis sebagai berikut

3.5.1 Analisis Deskriptif Kualitatif.

Menurut Yin (2009), analisis data terdiri atas pengujian, pengkatagorian, pentabulasian, ataupun pengombinasian kembali bukti-bukti untuk menunjukkan proposisi awal suatu penelitian. Setiap penelitian hendaknya dimulai dengan strategi analisis yang umum.

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Yin (2009), menyatakan bahwa dalam proses analisis data dilangsungkan dengan proses: (1) dari data hasil wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi yang telah ditetapkan, dimasukkan informasi sesuai kategori pada tujuan penelitian, (2) setelah data tersebut dipilah-pilah secara kategori, maka data mulai diurutkan sesuai urutan kronologis, (3) menjelaskan informasi yang didapat dari hasil penelitian dilapang.

Analisa data deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Menjelaskan seberapa besar peran TPI dalam pelaksanaan jual beli ikan hasil tangkapan nelayan
2. Menganalisis kelebihan dan kekurangan jual beli ikan di TPI dan luar TPI

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara berurutan:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Seluruh data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis, menggolongkan data berdasarkan tiap

permasalahan, menyingkirkan data yang tidak dibutuhkan, dan mengorganisasikan data yang dibutuhkan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

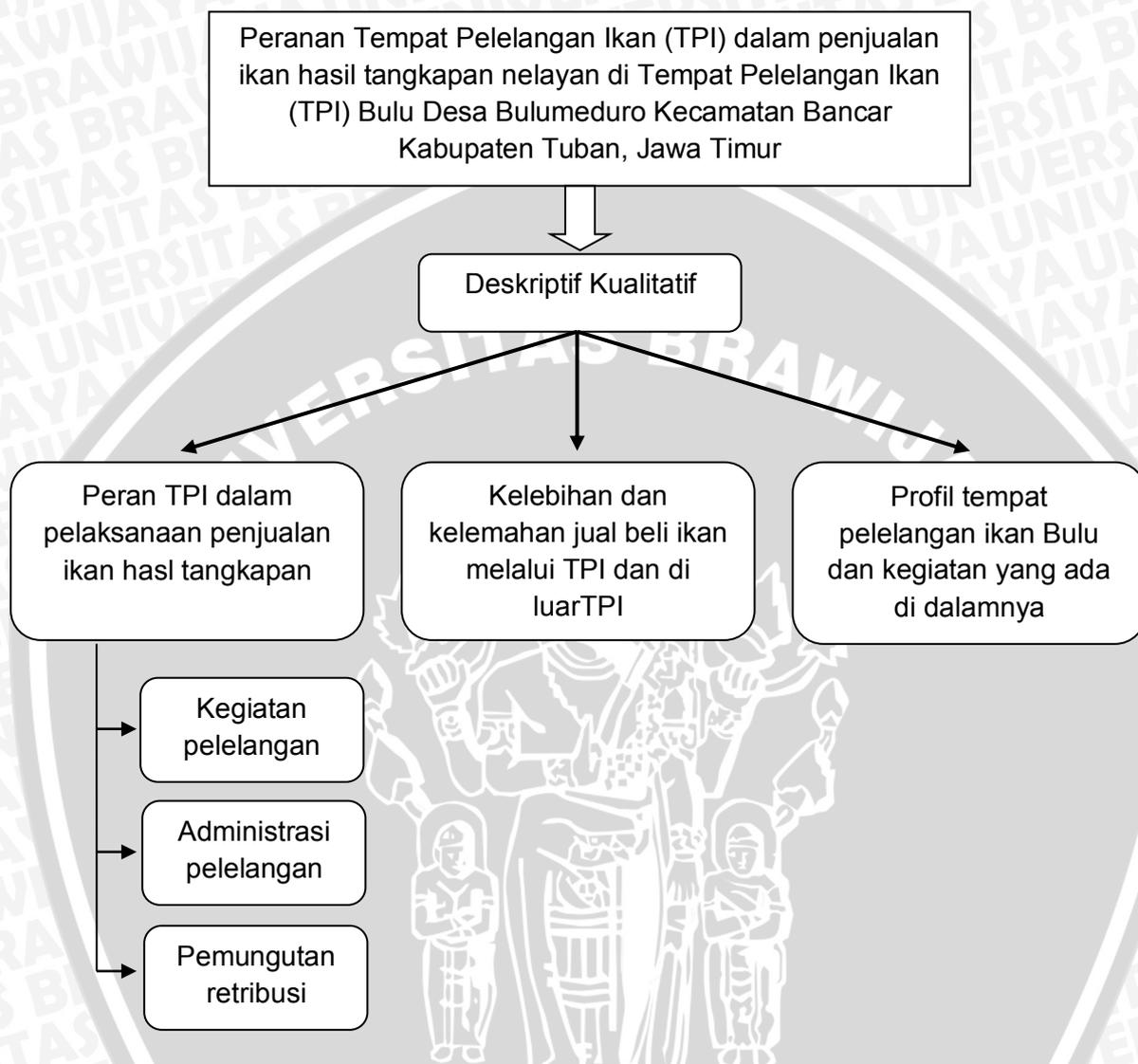
Penyajian data dimaksudkan agar lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Informasi dianalisis sesuai dengan tujuan yang diteliti. Data disajikan sesuai dengan apa saja yang diteliti.

3. *Conclusion Drawing*

Dalam penelitian ini alur kegiatan terakhir adalah penarikan kesimpulan apakah peranan TPI Bulu sudah sesuai dengan yang di intriduksikan oleh pemerintah.



Berikut adalah gambaran deskriptif kualitatif peran TPI terhadap penjualan ikan hasil tangkapan nelayan disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Visualisasi Analisis Data Penelitian

3.5.2 Analisis Pendapatan Nelayan

Untuk menganalisis pendapatan nelayan dilakukan analisis finansial. Analisis pendapatan nelayan dilakukan perhitungan per bulan pada saat penelitian dilakukan yaitu pada bulan Mei 2016.

Pendapatan nelayan dapat dihitung dengan cara:

- 1) Total penerimaan selama melakukan penangkapan di Bulan Mei dihitung dengan mengalikan antara jumlah hasil tangkapan dengan harga ikan.
- 2) Total penerimaan yang didapat tersebut, dikurangi biaya retribusi pelelangan ikan sebesar 2,5% (sesuai ketentuan yang berlaku), Biaya bahan bakar, konsumsi, es batu, dan tambat labuh.
- 3) Setelah penerimaan yang diperoleh dikurangi dengan biaya untuk melakukan usaha penangkapan ikan, maka dilakukan pembagian keuntungan antara pemilik kapal (juragan) dengan ABK sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.
- 4) Bagian hasil yang diterima pemilik kapal (juragan) kemudian dikurangi biaya tetap dalam usaha penangkapan ikan. Pendapatan nelayan bersih (π) nelayan dihitung berdasarkan selisih antara penerimaan total (*total revenue*/TR) dengan biaya total (*total cost*/TC) dengan rumus (Mankiw, 2006) :

$$\pi = TR - TC$$

Kriteria yang digunakan : $\pi > 0$ = untung, $\pi < 0$ = rugi

π = Pendapatan bersih

TR = Total penerimaan

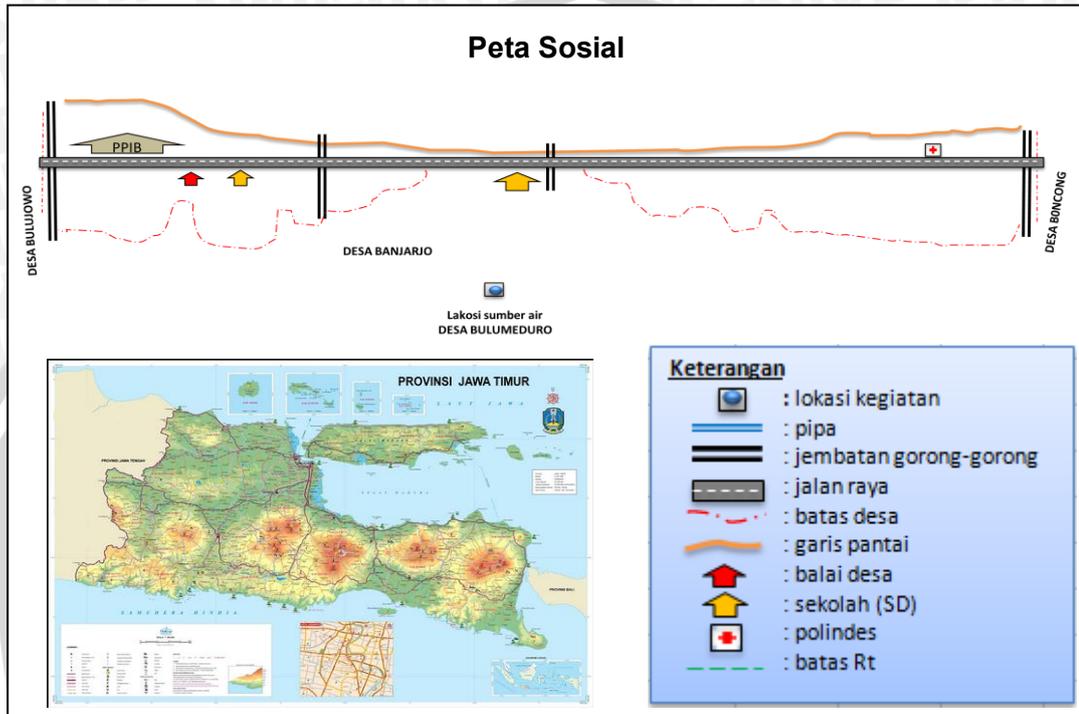
TC = Total biaya



4. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis dan Keadaan Topografi Desa



**Gambar 5. Peta Desa Bulumeduro
(Arsip Data Kantor Desa Bulumeduro, 2016)**

Lokasi pada kegiatan Penelitian adalah di Desa Bulumeduro Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Kawasan Bancar terletak pada lahan yang memiliki kondisi topografi yang bervariasi antara pantai, daratan, dan perbukitan, dengan ketinggian 1-100 m diatas permukaan laut. Pada bagian selatan kawasan merupakan daratan, sedangkan pada bagian utara merupakan laut dengan kedalaman sekitar 10 – 40 m dengan dasar perairan pasir dan beberapa daerah berkarang dengan arah arus dominan ke arah Barat. Dengan kedalaman laut ini, diperkirakan pantai tersebut mampu menampung perahu – perahu yang berbobot 3 – 20 Gross Tonnage (GT) (Profil Desa Bulumeduro, 2016).

Desa Bulumeduro terletak di Kecamatan Bancar dengan batas – batas meliputi:

Batas wilayah utara : Laut Jawa

Batas wilayah timur : Desa Boncong

Batas wilayah selatan : Desa Banjarjo

Batas wilayah barat : Desa Bulujowo

Desa Bulumeduro berdasarkan keadaan topografinya merupakan dataran sedang yaitu sekitar 0-5 m diatas permukaan laut, terletak di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban dengan bentang lahan seluas 4,5 Ha. Jarak tempuh Desa Bulumeduro ke ibu kota kecamatan adalah 6,5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah ± 45 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam. Secara geografis keseluruhan wilayah merupakan pemukiman penduduk dan wilayah pesisir.

4.1.2 Keadaan Iklim

Keadaan cuaca di Desa Bulumeduro seperti umumnya di Kabupaten Tuban, yaitu beriklim tropis dengan suhu antara 25 °C hingga 27,50 °C. Desa Bulumeduro dipengaruhi oleh musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan pada tahun 2015 mencapai 46.994,00 mm per tahun. Hari hujan tercatat sebesar 2.625 dengan rata-rata per bulan sebesar 4.082,83 (Profil Desa Bulumeduro, 2016).

4.1.3 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Bulumeduro menurut data dasar profil Desa tahun 2015 berjumlah 1.094 orang, yang terdiri dari 536 orang Laki-laki dan 558 orang perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 326. Untuk mengetahui lebih jelas tentang keadaan penduduk Desa Bulumeduro berdasarkan jenis kelamin di Desa Bulumeduro disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Data penduduk Desa Bulumeduro berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Laki – laki	536	49
2	Perempuan	558	51
Total		1.094	100

(Profil Desa Bulumeduro, 2015)

Dalam sektor pendidikan, wilayah Desa Bulumeduro masih harus mendapat perhatian lebih lanjut dikarenakan penduduk Desa Bulumeduro yang tidak menempuh pendidikan sama sekali sebanyak 182 orang (17%), tamat SD/ sederajat 485 orang (44%), tamat SMP/ sederajat sebanyak 308 orang (28%), tamat SMA/ sederajat sebanyak 103 orang (10%), dan tamatan Perguruan tinggi D1-S1 sebanyak 16 orang (1%).

Keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan serta jumlah sarana pendidikan di Desa Bulumeduro disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Data penduduk Desa Bulumeduro berdasarkan tingkat pendidikan

No	Keterangan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Pra-Sekolah	182	17
2	Tamat SD/ sederajat	485	44
3	Tamat SMP/ sederajat	308	28
4	Tamat SMA/ sederajat	103	10
5	Tamat PT/ sederajat	16	1
Total		1.094	100

(Profil Desa Bulumeduro, 2015)

Prasarana pendidikan sangat mendukung tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Desa Bulumeduro. SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan universitas di Desa Bulumeduro tidak ada, sehingga untuk menempuh pendidikan itu harus menempuh perjalanan ke Kecamatan Bancar maupun ke Kabupaten Tuban. Berikut merupakan prasarana pendidikan formal di Desa Bulumeduro yang disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Prasarana Pendidikan Formal di Desa Bulumeduro

No	Jenis Prasarana	Jumlah (Unit)	Persentase (%)
1	Taman kanak-kanak	2	67
2	SD	1	33
3	SMP	0	0
Total		3	100

(Profil Desa Bulumeduro, 2015)

Berdasarkan mata pencahariannya, penduduk Desa Bulumeduro sebagian besar bekerja di sektor perikanan, dimana tercatat 627 jiwa (91%) bekerja di sektor perikanan, 56 jiwa (8%) bekerja di sektor jasa/ perdagangan, dan 5 jiwa (1%) bekerja di sektor industri. Suatu angka yang sangat besar di sektor perikanan dengan melihat potensi sumberdaya yang besar diimbangi dengan sumberdaya manusia yang besar pula. Berikut merupakan keadaan penduduk menurut mata pencaharian disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Struktur Mata Pencaharian Penduduk Desa Bulumeduro

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Sektor Perikanan	627	91
2	Jasa/ perdagangan	56	8
3	Sektor industri	5	1
Total		688	100

(Profil Desa Bulumeduro, 2015)

4.2 Keadaan Umum Perikanan

4.2.1 Nelayan

Menurut Undang – undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam BAB 1 pasal 1 menyebutkan bahwa nelayan adalah orang yang bermata pencaharian menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan menurut Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam BAB 1 pasal 1, nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 Gross Ton (GT).

Pemerintah memiliki program untuk memberdayakan nelayan kecil, pembudidaya ikan, serta pengembangan SDM dan kelompok nelayan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Berdasarkan Undang-Undang, disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk membangun dan membina prasarana perikanan. Hal tersebut juga dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 bahwasanya prasarana dan pemasaran sebagai dimaksud paling sedikit meliputi Tempat pengolahan ikan, Tempat penjualan hasil perikanan, jalan distribusi dan instalasi penanganan limbah. Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas pemberdayaannelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Jumlah nelayan yang beroperasi di Kecamatan Bancar khususnya di Desa Bulumeduro sampai bulan April 2016 berjumlah 685 orang yang terbagi atas 219 orang pemilik perahu dan 466 orang pandega atau ABK. Berikut merupakan daftar nelayan di Desa Bulumeduro yang disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Daftar Nelayan di Desa Bulumeduro

No	Nelayan	Jumlah	Persentase (%)
1	Pemilik perahu	219	32
2	ABK	466	68
	Jumlah	685	100

(Profil Desa Bulumeduro, 2015)

Nelayan di Desa Bulumeduro merupakan penduduk asli Desa Bulumeduro. Beberapa penduduk Desa Bulumeduro secara turun-temurun telah menjadi nelayan. Beberapa lainnya berasal dari penduduk Kecamatan Tambakboyo dan Kecamatan Palang.

4.2.2 Armada Penangkapan

Armada penangkapan yang digunakan di Desa Bulumeduro semuanya menggunakan perahu motor yang berkapasitas 1-22 Gross Tonage (GT). Berikut merupakan jumlah armada penangkapan di Desa Bulumeduro disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Jumlah Armada Penangkapan di Desa Bulumeduro

No	Jenis Perahu	GT	Jumlah
1	Perahu Jaten	1-5 GT	78
2	Perahu BC	6-10 GT	115
3	Perahu BC	11-30 GT	26
Jumlah			219

(UPTD Perikanan dan Kelautan Kecamatan Bancar, 2016)

Jumlah armada terbanyak adalah perahu jaten berkapasitas 1-5 GT. Nelayan menggunakan perahu tersebut karena biaya pembuatan yang tidak mahal, sebanding dengan kekuatan perahu, dan sesuai dengan kegiatan penangkapannya. Kelemahan perahu yang berkapasitas 1-5 GT adalah tidak dapat membawa alat tangkap yang banyak sehingga hasil tangkapan yang didapat sedikit. Kelemahan alat tangkap yang berkapasitas 5-10 GT adalah biaya pembuatan yang mahal tetapi kapasitas perahu yang memadai untuk alat tangkap yang memadai untuk operasi penangkapan Purse sein.

4.2.3 Jenis dan Jumlah Alat Tangkap

Berikut merupakan data jenis dan jumlah alat tangkap yang beroperasi di Desa Bulumeduro sampai Bulan April 2016 yang disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Jenis dan Jumlah Alat Tangkap yang Beroperasi di Desa Bulumeduro

No	Jenis Alat Tangkap	Jumlah
1	Purse sein	25
2	Payang gardan	98
3	Gill net	68
Jumlah		191

(UPTD Perikanan dan Kelautan Kecamatan Bancar, 2016)

Jenis alat tangkap Purse sein yang beroperasi di Desa Bulumeduro sebanyak 25 buah, Payang gardan sebanyak 98 buah, dan Gill net sebanyak 68 buah.

4.2.4 Jenis dan Jumlah Produksi Ikan

Di Desa Bulumeduro terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berada di dalam Pelabuhan Perikanan Bulu, TPI Bulu merupakan fasilitas yang dimiliki

oleh Pelabuhan Perikanan Bulu. Semua hasil tangkapan nelayan didaratkan di Pelabuhan Perikanan Bulu tetapi tidak semua hasil tangkapan dilelang di TPI. Hasil tangkapan ada yang langsung dijual kepada tengkulak dan konsumen rumah tangga. Ikan yang dilelang di TPI Bulu sebagian besar hasil tangkapan alat tangkap Purse sein, Payang, dan Gill net. Ikan yang ditangkap diantaranya adalah ikan Selar, teri, layur, pari, cumi, petek, kakap merah, baronang, tongkol, dan kuniran. Berikut merupakan jenis ikan tangkapan nelayan yang disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Jenis Ikan Tangkapan Nelayan

No	Jenis Ikan	Harga per Kg
1	Petek	4.000
2	Layur	6.000
3	Cumi-cumi	23.000
4	Kuniran	4.000
5	Kakap Merah	23.000
6	Pari	8.000
7	Moto Ombo	6.000
8	Teri	9.000
9	Selar	5.000
10	Dorang	25.000
11	Baronang	20.000
12	Tongkol	15.000
13	Tengiri	18.000
14	Rajungan	20.000

(Data TPI Bulu, 2016)

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Profil dan Kegiatan Perikanan di TPI Bulu

5.1.1 Sejarah Perkembangan TPI Bulu

Nelayan menjual ikan hasil tangkapan langsung kepada bakul atau menjual ke pasar. Pada tahun 1985 Kepala Desa Bulu mengusulkan pembuatan tempat pelelangan ikan di Desa Bulu. Usulan Kepala Desa Bulu mendapat tanggapan positif dari pemerintah Tahun 1986 Tempat Pelelangan Ikan dengan bangunan sederhana didirikan di tanah kas Desa Bulumeduro.

Melihat dampak positif yang dirasakan nelayan sejak didirikannya TPI Bulu, pemerintah daerah Tuban kemudian menindak serius pembangunan TPI Bulu dan mensertifikatkan menjadi milik pemerintah daerah Tuban pada tahun 1988. Penyelenggara lelang TPI yaitu koperasi Trisno Maneko Karyo, tetapi seiring berjalannya waktu koperasi ini tidak berjalan dengan baik kemudian diganti dengan koperasi Mina Sejahtera pada tahun 1998. Tetapi pada tahun 2000-2013 TPI Bulu hampir tidak beroperasi karena Koperasi Mina sejahtera tidak menyelenggarakan pelelangan dikarenakan banyak hal yang menghambat. kemudian pada tahun 2012 ada pembangunan Pelabuhan Perikanan Bulu di sebelah timur bangunan TPI lama dan TPI Bulu di pindah di dalam Pelabuhan Perikanan Bulu sebagai salah satu fasilitas yang ada di Pelabuhan Perikanan.

Pada tahun 2014 TPI Bulu yang berada di Pelabuhan Perikanan Bulu diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur Bapak Soekarwo. Penyelenggara TPI diantaranya adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Tuban dibantu oleh UPTD Perikanan Bancar dan Administratur TPI yang memiliki tugas untuk melaksanakan jalannya pelelangan di TPI Bulu. Tujuan didirikannya TPI Bulu adalah untuk meningkatkan pendapatan asli Desa dan meningkatkan pendapatan Daerah untuk peningkatan pembangunan dan pelayanan

masyarakat nelayan serta untuk meningkatkan penyediaan ikan yang bermutu sehingga dapat meningkatkan nilai jual ikan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan dan bakul.

5.1.2 Visi, Misi dan Tujuan TPI Bulu

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bulu dikelola oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban yang mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi :

Mewujudkan pemberdayaan masyarakat nelayan (produsen) dan bakul (konsumen).

Misi :

- Meningkatkan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat nelayan (produsen) dan bakul (konsumen).
- Meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat nelayan (produsen) dan bakul (konsumen) dalam penyelenggaraan pelelangan ikan.
- Meningkatkan profesionalitas dan kinerja karyawan TPI di sektor pelelangan ikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Tujuan :

- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk peningkatan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat nelayan dan bakul
- Meningkatkan penyediaan ikan yang bermutu sehingga dapat meningkatkan nilai jual yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan dan bakul.
- Meningkatkan tingkat konsumsi ikan masyarakat
- Meningkatkan kecerdasan masyarakat dan bangsa melalui pemenuhan potensi hewani yang juga merupakan tujuan pembangunan nasional.

(Profil TPI Bulu, 2016)

5.1.3 Fasilitas Pokok dan Fasilitas Penunjang TPI Bulu

Fungsi pokok Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bulu adalah sebagai prasarana pendukung aktivitas nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut, penanganan dan pengolahan hasil ikan tangkapan dan sebagai tempat untuk memasarkan ikan hasil tangkapan nelayan. Berdasarkan fungsi tersebut, maka sasaran dan tujuan yang hendak dicapai oleh TPI Bulu adalah dengan pelayanan yang diberikan diharapkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan dapat meningkat.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bulu merupakan TPI yang aktif dalam kegiatan perikanan karena mempunyai fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan pendaratan dan pelelangan ikan, fasilitas TPI Bulu terdiri dari fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Fasilitas fungsional berfungsi untuk memberikan pelayanan dan manfaat langsung yang diperlukan untuk kegiatan operasional suatu pelabuhan perikanan. Fasilitas fungsional yang ada di TPI Bulu disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Fasilitas Fungsional TPI Bulu

No	Nama Fasilitas	Foto	Fungsi
1	Kantor TPI		Tempat karyawan TPI bekerja dan administrasi kegiatan pelelangan.
2	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Sebagai tempat kegiatan lelang dilaksanakan.
3	Air Bersih		Berfungsi untuk mencuci ikan hasil tangkapan yang akan atau telah di lelang dan sebagai sarana untuk membersihkan lantai TPI setelah kegiatan pelelangan berakhir.

Dilanjutkan pada halaman berikutnya

Lanjutan Tabel 12. Fasilitas Fungsional TPI Bulu

4	Timbangan		Menimbang ikan hasil tangkapan yang baru turun dari kapal sebelum dilelang, timbangan berkapasitas 100 kg.
5	Drum		Berfungsi untuk menyimpan ikan maupun menyimpan cadangan air bersih dengan daya tampung ikan 100kg.
6	Laptop		Menyimpan data-data, sebagai tempat penyimpanan data transaksi penjualan dan bon.
7	Kursi Lelang		Kursi lelang berfungsi untuk tempat duduk juru lelang selama pelaksanaan peelangan berlangsung.
8	Lemari		Menyimpan barang-barang dan dokumen penting milik TPI Bulu.
9	Meja Kerja		Meja untuk kepala UPTD dan Administratur TPI Bulu untuk menunjang kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
10	Tempat Pengandaan Karcis		Mencocokkan karcis lelang dari bakul dengan karcis lelang dari nelayan.

Dilanjutkan pada halaman berikutnya

Lanjutan Tabel 12. Fasilitas Fungsional TPI Bulu

11	Printer		Mencetak data-data dan nota transaksi.
12	Kalkulator		Menghitung administrasi pada saat transaksi penjualan.
13	Microphone dan Speaker		Sebagai alat penguat suara pada saat proses pelelangan berlangsung.
14	Kipas angin		Untuk mendinginkan ruangan.
15	Karcis Lelang		Diisi oleh juru lelang setelah penjual dan pembeli melakukan transaksi lelang.
16	Nota Penjualan		Diisi oleh juru nota penjualan dan kemudian diberikan kepada nelayan.

(Dokumentasi lapang skripsi, 2016)

Fasilitas penunjang adalah fasilitas yang secara tidak langsung mempertinggi peranan pelabuhan perikanan dan tidak termasuk fasilitas dasar atau fungsional. Untuk fasilitas penunjang yang ada pada TPI Bulu disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Fasilitas Penunjang di TPI Bulu

No	Nama Fasilitas	Gambar	Fungsi
1	Cool storage dan tempat penyimpanan es		Sebagai tempat penyimpanan ikan dan tempat penyimpanan es.
2	Cool box		Untuk menyimpan ikan sementara waktu
3	Stasiun pengisian solar		Sebagai tempat nelayan membeli solar untuk melaut
4	Penggiling es		Untuk mempermudah penghancuran es untuk mengawetkan ikan di dalam cool box

(Dokumentasi lapang skripsi, 2016)

5.1.4 Kegiatan Perikanan di TPI Bulu

a) Kegiatan yang Berkaitan Dengan Produksi

- ✓ Tambat labuh perahu atau kapal
- ✓ Bongkar muat hasil tangkapan
- ✓ Penyaluran perbekalan dan awak kapal
- ✓ Pemeliharaan alat tangkap

b) Kegiatan yang Berkaitan Pengolahan dan Pemasaran

- ✓ Penanganan hasil tangkapan
- ✓ Pelelangan ikan
- ✓ Pengepakan dan pendistribusian

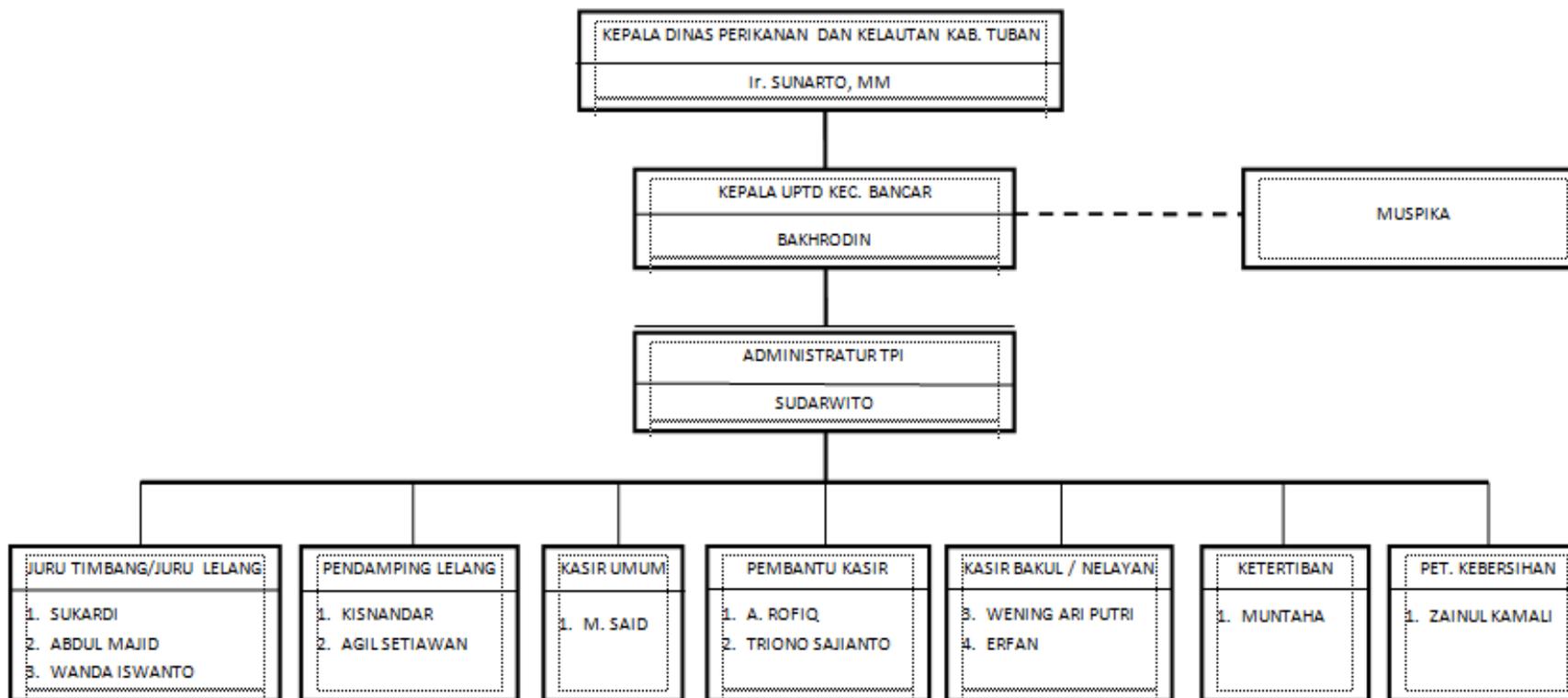
c) Kegiatan pembinaan dan pengembangan nelayan

- ✓ Penyuluhan dan pelatihan
- ✓ Pengaturan (keamanan, perizinan)
- ✓ Pengumpulan data statistik perikanan

Kondisi fisik dari bangunan dan fasilitas yang ada di TPI Bulu saat ini cukup baik, tetapi fasilitas yang ada di TPI Bulu masih belum beroperasi secara maksimal bahkan ada yang terbengkalai karena sudah jarang digunakan. Fasilitas untuk menunjang berbagai aktivitas belum terlaksana dengan baik diantaranya yaitu daftar kapal melaut, pengolahan dan pembinaan mutu ikan, pengumpulan data statistik perikanan, pengendalian dan pengawasan kapal ikan, penyampaian informasi perikanan kepada nelayan, pengembangan masyarakat nelayan dan pembinaan masyarakat sekitar pantai.

Kendala dan hambatan yang ditemui di TPI adalah belum terlaksana semua kegiatan yang ada di TPI secara tertib, rendahnya kesadaran beberapa nelayan untuk melakukan transaksi jual beli di TPI, pengawasan dan pembinaan yang kurang. Dari hambatan yang ada diperlukan pengembangan TPI, dan pembinaan nelayan secara rutin atau terjadwal. Pengembangan TPI dan pembinaan nelayan diharapkan dapat meningkatkan semua aktivitas perikanan di TPI Bulu.

5.1.5 Struktur Organisasi TPI Bulu



Gambar 6. Struktur Organisasi TPI Bulu

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bulu diselenggarakan langsung oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban melalui kepala UPTD Kecamatan Bancar yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Tuban serta dibantu oleh Administratur TPI dengan 12 karyawan TPI. Berikut merupakan susunan organisasi dan tugas Karyawan TPI Bulu disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Status dan tugas karyawan TPI Bulu

No	Status	Tugas
1	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Tuban	Sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI
2	Kepala UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan	Mengkoordinasi pelaksanaan pekerjaan di masing-masing TPI dan kegiatan lain di lingkungan TPI
3	Administratur TPI	Memimpin pelaksanaan lelang, melaksanakan retribusi dan menyetorkan retribusi
4	Juru lelang	Melelang ikan hasil tangkapan nelayan kepada konsumen atau bakul
5	Juru timbang	Membantu nelayan dan bakul yang ingin menimbang ikan.
6	Pendamping lelang	Membantu juru lelang dalam proses pelelangan
7	Kasir nelayan	melayani nelayan yang ingin mengambil uang lelang hasil tangkapan
8	Kasir bakul	melayani bakul yang ingin membayar ikan yang telah dibeli melalui lelang
9	Pembantu kasir	membantu kasir bakul dan kasir nelayan
10	Ketertiban	Mengawasi dan mengamankan dalam jalanya proses pelelangan di TPI Bulu
11	Kebersihan	Membersihkan gedung TPI maupun kantor TPI.

(TPI Bulu ,2016)

TPI Bulu memiliki kepengurusan secara struktural, dimana susunan organisasi TPI memiliki hubungan yang erat, peran TPI sebagai pelaksana pelelangan ikan sekaligus sebagai penyelenggara pelelangan. Kepala UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan ditentukan oleh pihak DKP Tuban, sedangkan untuk karyawan TPI dipilih oleh kepala UPTD dan masyarakat berdasarkan kemampuannya. Sistem kepengurusan yang telah terbentuk ini telah berjalan sesuai dengan tugas masing-masing.

5.2 Peranan TPI Dalam Pelaksanaan Penjualan Ikan Hasil tangkapan

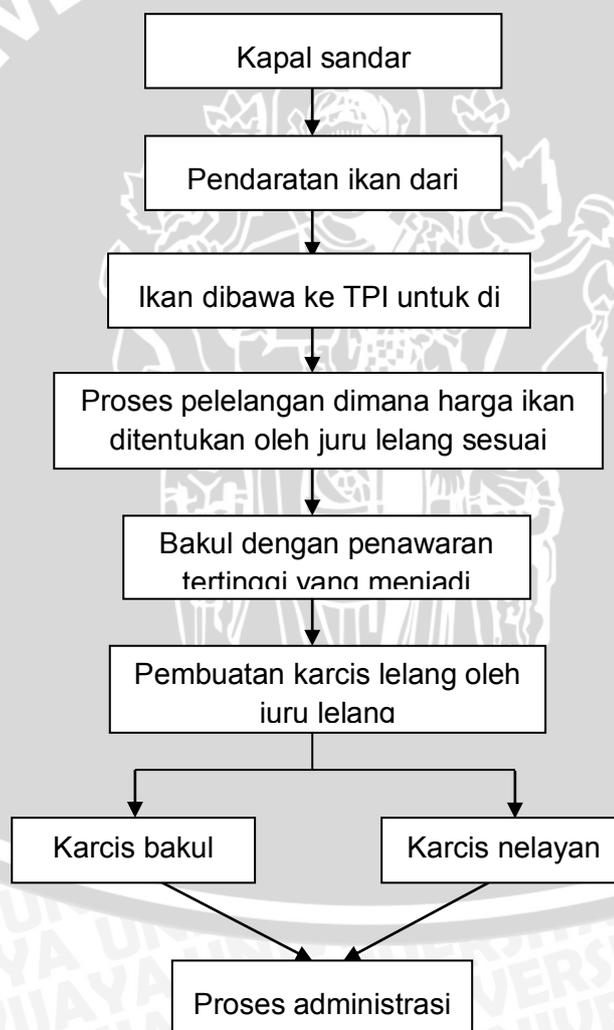
5.2.1 Proses Pelelangan Ikan di TPI Bulu

Proses pelelangan ikan di TPI Bulu secara garis besar melalui dua tahapan yaitu kegiatan lelang dan kegiatan administrasi. Proses pelelangan di TPI Bulu dilaksanakan setiap hari kecuali nelayan libur melaut. Mekanisme pelaksanaan pelelangan di TPI Bulu diikuti oleh nelayan dan bakul serta pelaksanaan pelelangan diatur oleh petugas TPI. TPI Bulu menerapkan aturan untuk bakul yang ingin mengikuti proses lelang yaitu dengan menyerahkan uang jaminan/inden sebesar minimal 25% dari perkiraan nilai lelang sesuai yang diatur dalam Perda Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2015. Tetapi pada kenyataannya ada beberapa bakul yang tidak menyerahkan jaminan/inden kepada petugas TPI dan tetap menjadi peserta lelang, pihak TPI memberikan toleransi kepada beberapa bakul yang tidak menyerahkan uang jaminan/inden kepada TPI, akibatnya ada beberapa bakul yang kurang tertib dalam pembayaran lelang.

Kegiatan administrasi berupa pembuatan laporan aktivitas bulanan yang disetorkan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Tuban. Laporan tahunan yang berisi pencapaian kerja yang meliputi jumlah ikan yang dilelang, pungutan retribusi, dan setoran ke pemerintah daerah.

A. Alur Proses Lelang

Kegiatan pelelangan di TPI Bulu dilaksanakan secara lelang terbuka atau lelang terbuka melalui sampel dengan sistem penawaran meningkat. Syarat untuk menjadi peserta lelang seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2015 bahwasanya peserta lelang wajib untuk menyerahkan uang jaminan/ inden paling sedikit sebesar 25% dari perkiraan nilai lelang kepada petugas TPI sebelum mengikuti pelelangan. Pada umumnya diikuti oleh nelayan alat tangkap *purse seine* dan payang gardan. Berikut merupakan alur proses dalam kegiatan lelang di TPI Bulu yang disajikan pada Gambar 7.



Gambar 7. Alur Proses Pelelangan
(Kantor TPI Bulu, 2016)

Dari mekanisme lelang diatas dapat diuraikan seperti dibawah ini:

1. Kapal berlabuh di pelabuhan dan melakukan pendaratan ikan hasil tangkapan yang telah di pilah sesuai dengan ukuran dan jenisnya, kemudian di tampung dalam drum/basket.
2. Ikan yang telah di bongkar dari kapal kemudian di angkut untuk dibawa ke TPI dan dilakukan penimbangan sebelum dilelang. Biasanya pengangkutan ikan dari tempat pembongkaran menuju ke gedung TPI dibantu oeh juru angkut atau biasa disebut (manol), upah yang diterima juru angkut sebesar Rp2.000,00. untuk satu drum atau basket yang mereka angkut. Proses pengangkutan ikan dari satu kapal menuju TPI membutuhkan waktu sekitar 15 menit, tergantung banyak sedikitnya ikan yang didaratkan.
3. Ikan yang sudah didaratkan kemudian ditimbang. Ikan diambil beberapa ekor untuk diperlihatkan kepada pemilik ikan (nelayan dan juragan) dan calon konsumen (bakul). Mulai dari proses penimbangan hingga ikan ditata untuk siap di lelang membutuhkan waktu sekitar 30 menit.
4. Proses pelelangan dilakukan oleh juru lelang, dimana petugas/ juru lelang telah menetapkan harga sesuai dengan jenis dan banyaknya ikan yang akan di lelang sesuai dengan harga ikan di pasaran. Ikan yang akan dilelang ditawarkan kepada peserta lelang dengan penawaran meningkat sampai tersisa satu peserta lelang yang bertahan dan dinyatakan sebagai pemenang lelang. Peserta lelang mengangkat tangan tanda setuju dengan harga yang ditawarkan, apabila harga awal yang ditetapkan oleh juru lelang dan tidak ada seorangpun peserta lelang yang mengangkat tangan maka juru lelang akan menurunkan harga secara bertahap sampai ada peserta lelang yang menyetujui harga yang ditawarkan. Waktu yang dibutuhkan untuk melelang ikan cukup singkat, didukung dengan fasilitas yang ada di

TPI Bulu menjadikan nelayan dapat dengan mudah dan cepat melelang hasil tangkapannya.

5. Setelah terjadi kesepakatan harga dan telah ditentukan pemenang lelang, juru karcis lelang atau pembantu juru lelang membuat karcis untuk nelayan dan bakul yang memenangkan lelang. Karcis lelang dibuat rangkap 2 untuk bukti penukaran di loket.

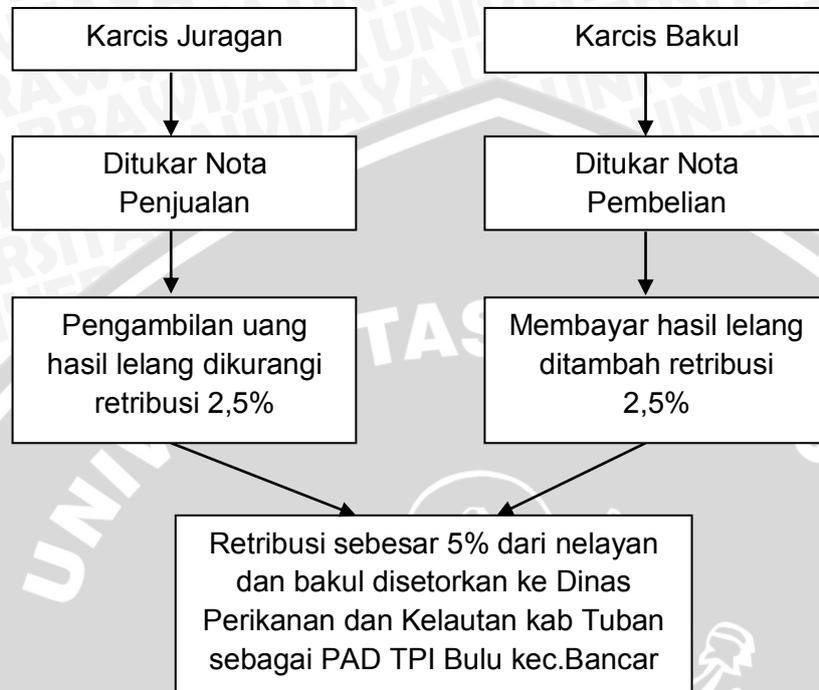
Dalam alur proses pelelangan yang dilakukan di TPI Bulu, waktu yang dibutuhkan nelayan mulai dari kapal sandar hingga ke proses administrasi cukup singkat yaitu rata-rata setiap kapal membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Sehingga kualitas ikan hasil tangkapan nelayan masih terjaga kualitasnya.

Di TPI Bulu tidak semua nelayan menjual ikan hasil tangkapannya melalui TPI dengan proses lelang, ada nelayan yang menjual ikannya langsung kepada bakul. Alasan nelayan menjual ikan langsung kepada bakul antara lain adalah karena telah ada ikatan hutang diantara mereka atau istri dari nelayan tersebut merupakan bakul. Ikan yang telah didaratkan kemudian ditimbang oleh juru timbang dan mengisi karcis timbang sesuai dengan jenis dan berat ikan yang telah ditimbang. Dalam proses ini nelayan langsung menjual ikan kepada bakul dengan kesepakatan yang telah ditentukan antara kedua belah pihak, selanjutnya nelayan memberi uang sukarela kepada juru timbang tanpa melalui juru kasir bakul.

B. Kegiatan Administrasi Pelelangan

Proses administrasi pelelangan dilakukan oleh bakul yang memenangkan lelang dan nelayan yang menjual ikan setelah proses pelelangan selesai. Selanjutnya nelayan (penjual) dan bakul (pembeli) menuju ke loket kantor TPI Bulu dengan membawa karcis yang diberikan oleh juru lelang pada saat proses pelelangan. Dimana nelayan berhak menerima hasil dari penjualan melalui lelang

dan bakul membayar ikan yang dimenangkan dari lelang. Proses administrasi pelelangan disajikan pada gambar 8.



Gambar 8. Kegiatan administrasi pelelangan

Penjelasan mengenai proses administrasi pelelangan di TPI Bulu yaitu

1. Bakul yang memenangkan lelang diwajibkan untuk membayar hasil lelang yang dimenangkannya dengan cara menukarkan karcis lelang yang telah ia miliki dengan nota pembelian. Kemudian bakul membayar sejumlah uang sesuai dengan nominal yang tertera pada nota pembelian. Kasir bakul akan memberikan tarif retribusi sebesar 2,5% sesuai dengan Perda No.8 tahun 2011. Semua transaksi dan kegiatan lelang ikan dibukukan dalam administrasi TPI.
2. Nelayan yang telah melelang hasil tangkapannya akan mendapatkan karcis lelang dari juru lelang, kemudian karcis lelang yang dimiliki nelayan diserahkan kepada kasir nelayan dan kemudian ditukar dengan nota

- penjualan untuk nelayan dan arsip untuk TPI, kemudian nelayan dikenakan retribusi sebesar 2,5%.
3. Setelah karcis lelang yang diserahkan oleh bakul diterima, maka akan digandakan dengan karcis lelang yang diserahkan oleh nelayan (juragan) yang kemudian didata dan di letakkan pada tempat penggandaan karcis lelang yang kemudian dicocokkan dengan karcis lelang bakul yang telah membayar lelang, apabila ada karcis yang belum ada pasangannya berarti masih ada bakul yang belum membayar (hutang).
 4. Setelah nelayan mendapatkan nota penjualan kemudian diserahkan kepada kasir, kemudian nelayan mendapatkan hasil penjualan yang telah dipotong retribusi sebesar 2,5%, selain itu nelayan ditarik uang untuk simpanan sukarela sebesar Rp 2.000,00 yang digunakan untuk membantu nelayan apabila ada kerusakan alat tangkap dll.

5.2.2 Pemungutan Retribusi

Pemungutan retribusi lelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban tertuang dalam Perbup No. 49 tahun 2014 BAB IV pasal 5 tentang struktur dan besarnya tarif yang berbunyi:

3. Setiap pengguna tempat pelelangan dikenakan retribusi
4. Besarnya tarif retribusi untuk pelayanan penyelenggaraan pelelangan di tempat pelelangan ikan ditetapkan dari harga transaksi penjualan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - c. Sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dipungut dari nelayan/petani ikan (penjual)
 - d. Sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dipungut dari pedagang/bakul (pembeli) ikan.

Pada laporan aktivitas pelelangan ikan pada tahun 2015 didapatkan volume ikan yang dilelang sebesar 1.286.898 kg dan nilai Rp 7.741.425.000. dengan retribusi sebesar 5% dimana retribusi bakul sebesar 2,5% dan nelayan sebesar 2,5%. Maka hasil retribusi pada tahun 2015 sebesar Rp 38.707.125 yang kemudian hasil retribusi akan disetor seluruhnya kepada pemerintah daerah.

Retribusi yang dibayarkan oleh nelayan (juragan) sebesar 2,5% tidak memberatkan nelayan karena harga jual ikan hasil tangkapan nelayan melalui lelang sesuai dengan harga ikan di pasaran. Hal tersebut antara lain dinyatakan oleh Bapak Sulaiman (53 tahun), Bapak Jayadi (42 tahun), dan Bapak Sudarwito (54 tahun) yang merupakan pemilik kapal (juragan) dan Administratur yang saya wawancarai, menyatakan bahwa:

“Pemungutan retribusi sebenarnya tidak ada masalah mas bagi saya, soalnya pihak TPI telah menyelenggarakan lelang dengan baik dan nelayan diuntungkan dengan harga jual ikan yang tinggi.”

“Tarif retribusi tidak masalah buat saya, asalkan prosesnya itu tertib dan para bakul tidak nunggu pembayaran. Kalau bayarnya nunggu kan repot mas buat bayar ABK dan beli perbekalan untuk melaut lagi.”

“Sampai saat ini Alhamdulillah dalam penyelenggaraan lelang dan peraturan yang ditetapkan untuk nelayan, termasuk besarnya pungutan retribusi tidak ada protes dari nelayan itu sendiri. Karena nelayan merasa tertolong dengan adanya kegiatan lelang yang diselenggarakan oleh TPI Bulu. Harga ikan hasil tangkapan mereka mampu bersaing dengan harga di pasaran.”

Namun hampir seluruh bakul/peserta lelang merasa keberatan dengan ditetapkannya tarif retribusi sebesar 2,5%, karena mereka merasa kurang diuntungkan. Disamping harga beli ikan di TPI yang cukup tinggi ditambah retribusi sebesar 2,5%, para bakul mengungkapkan keberatan mereka kepada pengelola TPI. Hal tersebut antara lain diungkapkan oleh Ibu Karsih (43 tahun), yang mengatakan bahwa:

“Ya keberatan mas sama retribusi yang ada di TPI Bulu, tarifnya tinggi. Harga ikan yang dilelang saja sudah tinggi terus masih ditambah retribusi jadi saya sulit untuk menjual ikannya lagi.”

Hal serupa juga dikemukakan oleh Ibu Darmo (50 tahun) selain sebagai peserta lelang, beliau juga memiliki usaha pengeringan ikan. Beliau mengeluhkan tingginya retribusi yang dibebankan kepada peserta lelang, menyatakan bahwa:

“Semua bakul yang ikut lelang di TPI Bulu merasa keberatan mas sama retribusinya, saya sendiri lebih sering ikut lelang di Rembang dan Juwana soalnya disana harganya lebih murah dan retribusinya lebih ringan di banding di sini mas. Paling kalau benar-benar kekurangan ikan, saya baru mau ikut lelang di TPI Bulu.”

Sehingga pihak TPI dibantu oleh Dinas Perikanan dan Kelautan melakukan pendekatan kepada bakul untuk memberikan pengertian kepada bakul mengenai retribusi dengan mengadakan sosialisasi kepada bakul. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala UPTD Perikanan Kecamatan Bancar yang saya wawancarai, menyebutkan bahwa:

“Para bakul ngeluh sama tingginya tarif retribusi yang ditetapkan, dan mereka meminta agar tarif retribusi diturunkan. Jadi kami berusaha untuk memberikan pengertian kepada bakul dengan cara sosialisasi langsung kepada bakul mengenai tujuan dari retribusi”

Pelaksanaan kegiatan pelelangan di TPI Bulu cukup baik. Hal tersebut terjadi karena adanya sarana prasarana yang memadai dan pembangunan TPI yang telah terealisasi. Antusias nelayan dalam menjual ikan melalui TPI terlihat dari banyaknya ikan yang dilelang selama tahun 2015, disamping itu nelayan dan bakul sebagai peserta lelang cukup tertib dalam mengikuti prosedur pelelangan yang ditetapkan. Tetapi masih ada beberapa bakul yang menjadi peserta lelang namun tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti lelang.

Dalam penarikan retribusi masih ada kendala yang dialami, hampir semua peserta lelang dan bakul merasa keberatan dengan besaran retribusi yang dikenakan. Permasalahan ini telah sering dibahas namun belum menemukan solusi yang tepat.

Didukung dengan diterbitkannya Undang-Undang No 7 Tahun 2016 pasal 36 tentang penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan

membebaskan pungutan usaha perikanan atau usaha pengaraman, baik berupa pajak maupun retribusi bagi nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, atau petambak garam kecil, termasuk keluarga nelayan dan pembudidaya ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran. sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Tuban No. 52 Tahun 2014 bahwasanya semua hasil penangkapan ikan yang tidak dipergunakan sebagai lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya harus dijual secara lelang di TPI dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada lagi kegiatan transaksi jual beli di luar TPI.

Penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI menurut Peraturan Bupati Tuban Nomor 52 Tahun 2014 bahwasanya Kepala Dinas bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelelangan ikan, penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dilaksanakan oleh UPTD sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pelelangan Ikan Bulu (TPI Bulu) mengenai penyelenggaraan pelelangan di TPI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 52 Tahun 2014, pasal 5 ayat 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan di masing- masing TPI dan kegiatan lain di lingkungan TPI yang meliputi:

- a. Penimbangan dan pelelangan ikan
- b. Kelancaran pungutan dan penyeteroran hasil pungutan lelang
- c. Pengamanan TPI
- d. Pengaturan bongkar muat ikan dan pengaturan penggunaan tempat pelelangan ikan
- e. Penyelenggaraan administrasi lelang
- f. Bimbingan, pengawasan dan pengendalian kegiatan
- g. Pembuatan laporan mingguan dan bulanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 52 Tahun 2014 mengenai penyelenggaraan pelelangan ikan dapat dibandingkan dengan hasil fakta di lapang dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel15. Perbandingan Perbup No 52 Tahun 2014 dengan fakta di lapang

No	Peraturan Bupati Tuban Nomor 52 Tahun 2014	Fakta di lapang
1	Penimbangan dan pelelangan ikan	Peranan TPI Bulu dalam melakukan kegiatan penimbangan dan pelelangan ikan berjalan dengan baik.
2	Kelancaran pungutan dan penyeteroran hasil pungutan lelang	Pungutan lelang atau retribusi lelang bagi nelayan dan bakul yang melakukan transaksi jual beli di TPI Bulu masih banyak menuai protes dari para bakul sebagai peserta lelang yang mengeluhkan tingginya tarif retribusi yang di tetapkan. Penyeteroran hasil pungutan lelang seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Tuban.
3	Pengamanan TPI	Pengamanan TPI Bulu berjalan dengan baik sehingga kegiatan yang ada di TPI Bulu dapat berjalan dengan lancar. Terdapat pos keamanan di area TPI Bulu.
4	Pengaturan bongkar muat ikan dan pengaturan penggunaan tempat pelelangan ikan	Kegiatan bongkar muat ikan di TPI Bulu dilakukan di area tempat pendaratan ikan berjalan baik. Dan pengaturan penggunaan tempat pelelangan ikan untuk berbagai kegiatan perikanan telah berjalan dengan baik.
5	Penyelenggaraan administrasi lelang	Dalam kegiatan administrasi lelang di TPI Bulu berjalan lancar dan pembayaran lelang secara tunai.
6	Bimbingan, pengawasan dan pengendalian kegiatan	TPI Bulu dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kurang berjalan dengan baik. Banyak sarana pendukung kegiatan nelayan yang tidak beroperasi secara maksimal.
7	Pembuatan laporan mingguan dan bulanan	Pembuatan laporan mingguan dan bulanan terkait data statistik perikanan maupun aktivitas kegiatan di TPI Bulu berjalan dengan baik, setiap bulan laporan kegiatan di serahkan ke DKP.

Dari tabel 15 bisa disimpulkan bahwa kegiatan di TPI Bulu terkait peranan dalam pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan menurut Peraturan Bupati Tuban Nomor 52 Tahun 2014 dibandingkan dengan kenyataan di lapang bahwa kegiatan yang ada di TPI Bulu berjalan cukup baik. Hanya pihak pemerintah terkait perlu meningkatkan kualitas pelayanan yang ada agar fungsi TPI dapat berjalan sebagaimana mestinya.

5.3 Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Ikan Melalui TPI dan di Luar TPI

5.3.1 Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Ikan Melalui TPI

Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan jual beli ikan di dalam TPI dan di luar TPI disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Ikan Melalui TPI

No	Kelebihan	Kekurangan
1	Syarat mengikuti lelang mudah	Pihak TPI kurang tegas dalam menegakkan aturan
2	Proses pelelangan cepat	
3	Prosedur pelelangan sederhana	
4	Harga ikan sesuai pasaran	
5	Proses administrasi mudah	
6	Pembayaran secara tunai	

a. Kelebihan

1. Syarat mengikuti lelang mudah

Persyaratan untuk menjadi peserta lelang di TPI Bulu mudah. Peserta cukup memberikan uang jaminan/inden paling sedikit sebesar 25% dari perkiraan nilai lelang kepada petugas TPI sebelum mengikuti lelang dan melengkapi administrasi yang ditentukan. Hal ini seperti yang tertulis dalam Perda nomor 12 tahun 2015 pasal 11.

2. Proses pelelangan sederhana

Proses pelelangan dilaksanakan secara lelang terbuka atau lelang terbuka melalui sampel dengan sistem penawaran meningkat, dimana peserta lelang sebagai penawar tertinggi yang ditetapkan sebagai

pemenang. Hal ini seperti yang tertuang dalam Perbup Tuban pasal 11 nomor 52 tahun 2014.

3. Harga lelang yang wajar melalui lelang murni

Dalam penentuan harga lelang oleh juru lelang ditetapkan berdasarkan jenis ikan, banyaknya ikan dan harga ikan di pasaran. Apabila juru lelang terlalu tinggi dalam penentuan harga awal lelang sehingga tidak ada satupun peserta lelang yang setuju, maka juru lelang akan menurunkan harga ikan lelang sampai ada peserta lelang yang setuju dengan harga yang ditawarkan.

4. Proses administrasi pelelangan yang mudah

Proses administrasi pelelangan di TPI Bulu sangatlah mudah dan jelas. Dimana para peserta lelang maupun pemilik ikan yang dilelang yang telah memiliki karcis lelang kemudian ditukarkan dengan nota pembelian ataupun nota penjualan. Kemudian bakul membayar sejumlah uang sesuai harga lelang dan nelayan berhak menerima uang dari hasil penjualan ikan melalui lelang.

5. Nelayan (juragan) dapat menerima hasil lelang secara tunai

Setelah bakul membayarkan perolehan lelang maka nelayan berhak mengambil uang hasil penjualan ikan melalui lelang ini secara tunai dengan dikurangi biaya retribusi sebesar 2,5%.

b. Kekurangan

Pihak TPI kurang tegas dalam menegakkan aturan untuk mengikuti proses lelang maupun sanksi bagi pelanggar. Seperti yang telah tertuang dalam Perda nomor 12 tahun 2015 mengenai persyaratan peserta lelang. Bahwasanya masih ada peserta lelang yang enggan memberikan uang inden / jaminan kepada pihak TPI sebelum mengikuti lelang. Selain itu juga terdapat penunggakan pembayaran yang dilakukan oleh peserta lelang.

Banyak kelebihan yang didapatkan nelayan maupun bakul yang mengikuti jual beli ikan melalui TPI, seperti kemudahan menjadi peserta lelang maupun kemudahan dalam proses pelelangan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sukardi (48 tahun) yang merupakan juru lelang di TPI Bulu.

“syarat-syarat untuk mengikuti lelang di TPI Bulu cukup sederhana dengan memberikan uang inden sebesar 25% dari perkiraan lelang. Ikan yang dilelang juga cepat laku terjual dan nelayan bisa menerima uang hasil lelang secara tunai”

Kegiatan jual beli ikan melalui TPI dengan proses lelang berjalan cukup baik. Banyaknya kelebihan yang didapatkan dalam jual beli ikan di TPI membuat banyak nelayan mau menjual ikan hasil tangkapannya melalui TPI. Ada beberapa bakul atau peserta lelang yang tidak tertib dalam mengikuti prosedur pelelangan, ada beberapa peserta lelang yang enggan membayar uang inden dan ada pula yang mempunyai tunggakan pembayaran yang belum dilunasi sehingga hal tersebut merugikan nelayan. Pihak TPI kurang tegas dalam menindak para peserta lelang yang tidak tertib dalam mengikuti prosedur pelelangan di TPI Bulu.

5.3.2 Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Ikan di Luar TPI

Selain nelayan dan bakul menjual dan membeli ikan melalui proses lelang, ada juga nelayan dan bakul yang melakukan transaksi jual beli diluar TPI atau tanpa melalui proses pelelangan. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan jual beli ikan di luar TPI yang disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Ikan di Luar TPI

No	Kelebihan	Kekurangan
1	Ikan langsung dijual tanpa lelang	Ikan tidak pasti laku terjual
2	Tidak ada pungutan retribusi	Penentuan harga secara sepihak oleh bakul bisa jadi merugikan nelayan

a. Kelebihan

1. Hasil tangkapan langsung dijual ke bakul tanpa proses lelang

Hal ini memang dapat mempersingkat waktu pemasaran ikan, mengingat ikan mudah rusak, tetapi nelayan tidak bisa melakukan

penawaran harga kepada bakul sehingga harga ikan hasil tangkapan nelayan secara sepihak ditentukan oleh bakul.

2. Tidak ada penarikan retribusi

Dalam proses jual beli ikan di luar TPI, ditangani sendiri oleh para nelayan sebagai pemilik ikan dengan bakul sebagai pembeli ikan. Jadi tidak ada pungutan retribusi.

b. Kekurangan

1. Hasil tangkapan yang tidak pasti langsung terjual

Dalam kegiatan jual beli ikan di luar TPI, terkadang bakul secara semena-mena mengembalikan ikan hasil tangkapan nelayan maupun membayar dengan harga murah dengan alasan ikan tidak laku di pasaran.

2. Penentuan harga sepihak bisa jadi merugikan nelayan

Penentuan harga ikan hasil tangkapan nelayan secara sepihak ditentukan oleh bakul tanpa ada upaya penawaran dari nelayan, sehingga sangat merugikan nelayan.

Jual beli ikan hasil tangkapan di luar TPI tanpa lelang juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kebanyakan nelayan yang menjual hasil tangkapan di luar TPI merupakan nelayan dengan alat tangkap skala kecil dengan hasil tangkapan sedikit. Selain itu ada juga nelayan yang memiliki istri yang berprofesi sebagai bakul dan ada juga yang memiliki ikatan kerjasama dengan bakul. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sarpan (45 tahun), Bapak Sutono (50 tahun), dan Bapak Matrukin (43 tahun) mengatakan bahwa.

“Saya menjual ikan langsung ke bakul dan pengepul, soalnya ikan hasil melaut saya cuma sedikit. Kalo jual ke TPI terlalu ribet mas soalnya ikannya juga campur- campur, jadi ya saya jualnya langsung ke bakul langganan saya”

“Ikan tangkapan saya langsung dijualkan istri saya mas, tapi kadang ikan yang gak langsung laku terjual atau ikan-ikan tertentu di keringkan atau di asap dulu baru dijual lagi. Saya belum pernah menjual ikan ke TPI”

“Saya belum pernah menjual ikan ke TPI, saya langsung menjual ke bakul langganan yang sudah saya percaya. Biasanya saya juga meminjam ke bakul kalo lagi butuh uang, nanti bayar hutangnya dari ikan yang saya setorkan”

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa banyak kelebihan dan kemudahan yang dirasakan nelayan dan bakul yang mengikuti lelang di TPI. Dimana nelayan dapat menjual ikan hasil tangkapan dengan proses cepat, mudah, serta harga yang wajar sesuai pasaran dan nelayan dapat menerima pembayaran dari hasil lelang secara tunai. Meskipun lebih banyak kelebihan yang diperoleh dalam jual beli ikan melalui TPI, namun masih ada nelayan dan bakul memilih transaksi jual beli di luar TPI. Umumnya mereka meliki alasan sendiri-sendiri seperti hasil tangkapan sedikit, istri sebagai bakul, maupun memiliki ikatan kerjasama dengan bakul.

5.4 Harga Jual dan Penerimaan Nelayan yang Menjual Hasil Tangkapan Melalui TPI dan di Luar TPI

5.4.1 Harga Jual Ikan melalui TPI dan di Luar TPI

Harga jual ikan biasanya dipengaruhi oleh musim dan permintaan, dimana apabila musim ikan dan hasil tangkapan nelayan melimpah sedangkan permintaan tetap, maka harga jual ikan akan turun. Sedangkan bila hasil tangkapan nelayan sedikit dan permintaan meningkat maka harga jual ikan tinggi. Berikut merupakan jenis ikan dan harga ikan yang dijual melalui TPI dan diluar TPI disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18. Jenis ikan dan harga jual melalui TPI dan di luar TPI

Uraian	TPI	Di luar TPI
	Harga/kg (Rp)	Harga/kg (Rp)
Petek	4.000	3.500
Layur	6.000	6.000
Cumi-cumi	23.000	22.000
Kuniran	4.000	4.000
Kakap Merah	23.000	22.000
Pari	8.000	8.000
Moto Ombo	6.000	4.000
Teri	9.000	7.000
Selar	5.000	5.000
Dorang	25.000	22.000
Baronang	20.000	20.000
Tongkol	15.000	15.000
Tengiri	18.000	19.000
Jumlah (Rp)	166.000	157.500
Selisih (Rp)	8.500	

(Data primer, 2016)

Pada tabel dapat dilihat bahwa semua jenis tangkapan yang di daratkan, ada yang dijual melalui TPI dan di luar TPI. Jika dibandingkan harga jual ikan melalui TPI dan di luar TPI terdapat selisih. Rata-rata harga jual ikan hasil tangkapan nelayan lebih tinggi bila dijual melalui TPI dengan proses lelang daripada dijual langsung kepada bakul tanpa proses lelang. Untuk penerimaan nelayan tergantung dari banyak sedikitnya ikan hasil tangkapan yang diperoleh.

Berikut merupakan persentase jumlah nelayan yang menjual ikan melalui TPI dan di luar TPI yang disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Persentase jumlah nelayan yang menjual ikan melalui TPI dan di luar TPI

No	Nelayan	Jumlah	Persentase(%)
1	Nelayan menjual melalui TPI	277	44
2	Nelayan menjual di luar TPI	353	56
Total		630	100

(Data Primer,2016)

Dari tabel diatas diketahui persentase nelayan yang menjual ikan melalui TPI dan di luar TPI. Nelayan yang menjual ikan melalui TPI 44% yang terdiri atas 277 nelayan. Nelayan yang menjual ikan di luar TPI 56% yang terdiri atas 353

nelayan. Jumlah dari keseluruhan nelayan pemilik kapal atau perahu yang ada di sekitar TPI Bulu yaitu 630 nelayan. Dari keseluruhan nelayan pemilik perahu atau kapal yang ada di sekitar TPI Bulu, nelayan yang menjual hasil tangkapan di luar TPI jumlahnya lebih banyak dibanding nelayan yang menjual hasil tangkapan melalui TPI.

5.4.2 Penerimaan Nelayan yang Menjual Ikan Hasil Tangkapan Melalui TPI

1. Nelayan Alat Tangkap Purse Seine

Alat tangkap *Purse Seine* merupakan salah satu alat tangkap yang digunakan nelayan di Desa Bulumeduro, alat tangkap ini cukup banyak digunakan oleh nelayan di Desa Bulumeduro karena hasil tangkapannya cukup banyak. ABK yang dibawa melaut rata-rata sekitar 14-18 orang untuk sekali melaut, operasi penangkapan alat tangkap ini adalah *one day fishing*. biasanya nelayan *Purse Seine* berangkat melaut pukul 15.00 WIB dan kembali sekitar pukul 04.00 WIB. Permasalahan yang biasa dihadapi oleh nelayan *Purse Seine* adalah angin kencang, ombak besar, cahaya bulan dan arus laut yang besar. Apabila sedang terjadi cuaca buruk maka nelayan *Purse Seine* tidak melakukan operasi penangkapan. Hal tersebut biasanya terjadi apabila sedang terjadi musim barat, menurut penuturan nelayan musim barat pada setiap tahunnya kurang bisa di perkirakan hanya saja biasa terjadi sekitar bulan September-Maret pada saat tersebut biasa disebut musim paceklik.

Pendapatan kotor nelayan *Purse Seine* rata-rata pada musim barat yaitu sekitar 1 ton, sedangkan pada musim timur atau musim ikan hasil tangkapan bisa mencapai 3-4 ton. Harga ikan pada saat musim barat yang masuk ke tempat pelelangan ikan akan lebih tinggi dibandingkan harga ikan pada saat musim timur, sehingga hal tersebut mempengaruhi pendapatan nelayan.

a) Modal Tetap

Modal secara umum dapat dibedakan atas modal aktif dan modal pasif. Modal aktif terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Sedangkan modal pasif terdiri dari modal sendiri dan modal asing. Modal usaha dalam pengertian ekonomi adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja untuk menghasilkan suatu barang baru (riyanto, 1995).

Modal tetap yang dikeluarkan pada usaha unit penangkapan *purse seine* di Desa Bulumeduro yaitu sebesar Rp 407.900.000. Biaya tetap usaha unit penangkapan *purse seine* meliputi kapal, mesin, alat tangkap purse seine, lampu tawur, lampu obor, basket, seser, jerigen. Ada pun rincian komponen biaya tetap yang disajikan pada Tabel 20.

Tabel 20. Modal tetap unit penangkapan *purse seine*

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Kapal	1	200.000.000	200.000.000
2	Mesin	2	70.000.000	140.000.000
3	Alat tangkap	1	50.000.000	50.000.000
4	Lampu tawur	25	200.000	5.000.000
5	Lampu obor	2	5.000.000	10.000.000
6	Basket	40	50.000	2.000.000
7	Seser	4	100.000	400.000
8	Jerigen	8	62.500	500.000
Total			325.412.500	407.900.000

(Data primer, 2016)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa modal tetap yang terbesar yaitu untuk pembelian kapal yaitu sebesar Rp 200.000.000. Modal tetap untuk membeli dua buah mesin yaitu sebesar Rp 140.000.000, untuk pembelian alat tangkap *purse seine* sebesar Rp 50.000.000, untuk pembelian lampu tawur sebanyak 25 unit yaitu sebesar Rp 5.000.000, modal untuk membeli lampu obor sebanyak 2 unit yaitu sebesar Rp 10.000.000, untuk pembelian basket sebanyak 40 unit yaitu sebesar Rp 2.000.000, untuk pembelian seser sebanyak 4 unit yaitu

sebesar Rp 400.000, dan untuk pembelian jerigen sebanyak 8 unit yaitu sebesar Rp 500.000.

b) Biaya Produksi

Menurut Riyanto (1995), biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang terjadi pada produksi jangka pendek. Biaya produksi ini dikeluarkan suatu usaha untuk melakukan kegiatan memproduksi sehingga menghasilkan output. Biaya tetap merupakan biaya yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Sedangkan biaya tidak tetap adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi.

Biaya produksi yang dikeluarkan pada unit penangkapan *purse seine* terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Besarnya biaya tetap dan biaya variabel nelayan dengan alat tangkap *purse seine* adalah sama, karena nelayan dengan alat tangkap *purse seine* menggunakan kapal dengan *gross tonage* (GT), dan peralatan yang dibawa relatif sama. Komponen biaya tetap untuk unit penangkapan *purse seine* disajikan pada Tabel 21.

Tabel 21. Komponen biaya tetap unit penangkapan *purse seine*

No	Biaya Tetap	Biaya (Rp)
1	Penyusutan kapal	1.111.111
2	Penyusutan mesin	1.166.666
3	Penyusutan <i>purse seine</i>	520.833
4	Penyusutan lampu tawur	83.333
5	Penyusutan lampu obor	166.667
6	Penyusutan basket	83.333
7	Penyusutan seser	16.667
8	Penyusutan jerigen	20.833
9	Perawatan	462.000
Total		3.631.943

(Data primer, 2016)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa total biaya tetap unit penangkapan *purse seine* yaitu sebesar Rp 3.631.943. Komponen biaya lain yaitu biaya variabel dengan komponen biaya solar, es batu, konsumsi, tambat

labuh, retribusi pelelangan, dan upah ABK. Komponen biaya variabel usaha unit penangkapan *purse seine* disajikan pada Tabel 22.

Tabel 22. Biaya variabel unit penangkapan *purse seine*

No	Biaya Variabel	Biaya (Rp)
1	Solar (Rp 5.150 x 17 trip pada bulan Mei x 150 liter per trip)	13.132.500
2	Es batu (Rp 8.000 x 17 trip pada bulan Mei x 20 balok per trip)	2.720.000
3	Konsumsi (Rp 6.000 x 17 trip pada bulan Mei x 18 bungkus)	1.836.000
4	Tambat labuh (Rp 2.000 x 17 trip di bulan Mei)	34.000
5	Retribusi pelelangan	2.280.040
6	Upah ABK (50% dari penerimaan dikurangi biaya variabel)	35.599.530
Total		55.602.070

(Data primer, 2016)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa biaya variabel untuk solar yaitu sebesar Rp 13.132.500, biaya variabel untuk penggunaan es batu yaitu sebesar Rp 2.720.000, biaya variabel yang dikeluarkan untuk konsumsi yaitu sebesar Rp 1.836.000, biaya variabel yang dikeluarkan untuk biaya tambat labuh kapal yaitu sebesar Rp 34.000, biaya untuk retribusi sebesar Rp 2.280.040, dan komponen biaya variabel terbesar yaitu upah ABK dimana sistem yang digunakan adalah bagi hasil, upah ABK diperoleh dari 50% dari total penerimaan dikurangi biaya variabel usaha tersebut yaitu sebesar Rp 35.599.530. Dan total biaya variabel yang dikeluarkan nelayan alat tangkap *purse seine* selama satu bulan (17 trip penangkapan) sebesar Rp 55.602.070.

c) Penerimaan

Menurut Munir (2010), penerimaan atau pendapatan merupakan hasil kali total produk dengan harga produk per satuan. Penerimaan unit usaha penangkapan *purse seine* diperoleh dari total hasil tangkapan selama satu bulan (17 kali trip penangkapan) dikali harga ikan. Penerimaan yang diperoleh unit usaha penangkapan *purse seine* dalam satu bulan yaitu sebesar Rp 91.201.600.

Total penerimaan unit penangkapan *purse seine* selama satu bulan disajikan pada Tabel 23.

Tabel 23. Total penerimaan unit penangkapan *purse seine* selama satu bulan

No	Deskripsi	Harga Jual (Rp)
1	Dalam satu bulan 17 kali penangkapan (Data primer, 2016)	91.201.600

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total produksi pada bulan Mei yaitu nelayan alat tangkap *purse seine* melakukan operasi penangkapan sebanyak 17 kali dengan total penerimaan dari hasil penjualan tangkapan sebesar Rp 91.201.600.

d) RC Ratio

Menurut Soekartawi (1994), *Revenue Cost Ratio* dikenal sebagai perbandingan antara penerimaan dengan biaya yang bertujuan untuk mengetahui apakah suatu usaha sudah menghasilkan keuntungan atau belum menghasilkan keuntungan. Dengan membandingkan *total revenue* dan *total cost*, maka ada 3 (tiga) kemungkinan yang akan terjadi, yaitu:

$R/C > 1$, maka usaha dikatakan menguntungkan

$R/C = 1$, maka usaha dikatakan tidak untung dan tidak rugi

$R/C < 1$, maka usaha dikatakan mengalami kerugian

RC Ratio pada usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap *purse seine* menunjukkan nilai 1,54 yang berarti nilai RC ratio lebih besar dari satu dapat diketahui bahwa usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap *purse seine* menguntungkan, karena dengan investasi terhadap usaha ini penerimaan yang diperoleh akan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan

e) Keuntungan

Menurut Bachtiar (2002), keuntungan usaha atau pendapatan bersih adalah besarnya penerimaan setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi baik tetap maupun tidak tetap. Besarnya keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut yaitu sebesar Rp 71.199.060 sebelum dikurangi upah ABK. Biaya yang dikeluarkan untuk upah ABK yaitu 50% dari keuntungan yang diperoleh usaha tersebut. Maka keuntungan yang diterima oleh pemilik kapal (juragan) sebesar Rp 35.599.530 dikurangi biaya tetap sebesar Rp 3.631.943 sehingga diperoleh keuntungan bersih pemilik kapal (juragan) sebesar Rp 31.967.587 per bulan.

2. Nelayan Alat Tangkap Payang Gardan

Salah satu jenis alat tangkap yang beroperasi di Desa Bulumeduro adalah Payang gardan dengan menggunakan kapal berkapasitas 10 GT. Semua hasil tangkapan yang diperoleh nelayan didaratkan di TPI Bulu, tetapi tidak semua hasil tangkapan dijual di TPI melalui lelang melainkan ada yang langsung dijual kepada bakul yang telah menunggu di tempat pendaratan ikan maupun kepada tengkulak yang telah terikat hutang dengan perjanjian yang telah disepakati.

Waktu operasi penangkapan ikan oleh nelayan dengan alat tangkap payang gardan ini biasanya berangkat melaut pukul 03.00 – 12.00 WIB, dengan jumlah ABK rata-rata sebanyak 8-12 orang. Peralatan melaut yang dibawa dalam operasi penangkapan ini meliputi: mesin gardan, payang, diessel, dan peralatan lain. Jenis ikan yang ditangkap adalah ikan kakap merah, ikan petek, ikan kembung, ikan tengiri, cumi-cumi, ikan pari, ikan sebelah. Menurut hasil wawancara yang saya lakukan dengan nelayan payang gardan, bahwa sebagian besar nelayan payang gardan menjual ikan hasil tangkapannya melalui TPI dengan proses lelang, namun ada sebagian kecil nelayan payang gardan yang

menjual hasil tangkapan di luar TPI tanpa proses lelang. Nelayan yang menjual hasil tangkapan di luar TPI karena istri sang pemilik kapal merupakan bakul.

a) Modal Tetap

Modal secara umum dapat dibedakan atas modal aktif dan modal pasif. Modal aktif terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Sedangkan modal pasif terdiri dari modal sendiri dan modal asing. Modal usaha dalam pengertian ekonomi adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja untuk menghasilkan suatu barang baru (riyanto, 1995).

Modal tetap yang dikeluarkan pada usaha unit penangkapan payang gardan di Desa Bulumeduro yaitu sebesar Rp 277.075.000. Biaya tetap usaha unit penangkapan payang gardan meliputi kapal, mesin, alat tangkap payang, mesin gardan, basket, seser, dan jerigen. Ada pun rincian komponen biaya tetap yang disajikan pada Tabel 24.

Tabel 24. Modal tetap unit penangkapan payang gardan

No	Jenis barang	Jumlah (unit)	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Kapal	1	125.000.000	125.000.000
2	Mesin	2	45.000.000	90.000.000
3	Alat tangkap	1	45.000.000	45.000.000
4	Gardan	1	15.000.000	15.000.000
5	Basket	30	50.000	1.500.000
6	Seser	2	100.000	200.000
7	Jerigen	6	62.500	375.000
	Total			277.075.000

(Data primer, 2016)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa modal tetap yang terbesar yaitu untuk pembelian kapal yaitu sebesar Rp 125.000.000. Modal tetap untuk membeli dua buah mesin yaitu sebesar Rp 90.000.000, untuk pembelian alat tangkap payang sebesar Rp 45.000.000, untuk pembelian gardan sebesar Rp 15.000.000, untuk pembelian basket sebanyak 30 unit yaitu sebesar Rp 1.500.000, untuk pembelian seser sebanyak 2 unit yaitu sebesar Rp 200.000, dan untuk pembelian jerigen sebanyak 6 unit yaitu sebesar Rp 375.000.

b) Biaya Produksi

Menurut Riyanto (1995), biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang terjadi pada produksi jangka pendek. Biaya produksi ini dikeluarkan suatu usaha untuk melakukan kegiatan memproduksi sehingga menghasilkan output. Biaya tetap merupakan biaya yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Sedangkan biaya tidak tetap adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi.

Biaya produksi yang dikeluarkan pada unit penangkapan payang gardan terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Besarnya biaya tetap dan biaya variabel unit usaha penangkapan payang gardan adalah sama, karena nelayan dengan alat tangkap payang gardan menggunakan kapal dengan *gross tonnage* (GT), dan peralatan yang dibawa relatif sama. Komponen biaya tetap untuk unit penangkapan payang gardan disajikan pada Tabel 25.

Tabel 25. Komponen biaya tetap unit penangkapan payang gardan

No	Biaya Tetap	Biaya (Rp)
1	Penyusutan kapal	694.444
2	Penyusutan mesin	500.000
3	Penyusutan payang	468.750
4	Penyusutan gardan	125.000
5	Penyusutan basket	62.500
6	Penyusutan seser	8.333
7	Penyusutan jerigen	15.625
8	Perawatan	445.000
	Total	3.014.096

(Data primer, 2016)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa total biaya tetap unit penangkapan payang gardan yaitu sebesar Rp 3.014.096. Komponen biaya lain yaitu biaya variabel dengan komponen biaya solar, es batu, konsumsi, tambat labuh, retribusi pelelangan, dan upah ABK. Komponen biaya variabel usaha unit penangkapan payang gardan disajikan pada Tabel 26.

Tabel 26. Biaya variabel unit penangkapan payang gardan

No	Biaya Variabel	Biaya (Rp)
1	Solar (Rp 5.150 x 19 trip pada bulan Mei x 120 liter per trip)	11.742.000
2	Es batu (Rp 8.000 x 19 trip pada bulan Mei x 15 balok per trip)	2.280.000
3	Konsumsi (Rp 6.000 x 19 trip pada bulan Mei x 12 bungkus)	1.368.000
4	Tambat labuh (Rp 2.000 x 19 trip di bulan Mei)	38.000
5	Retribusi pelelangan	1.647.585
6	Upah ABK (50% dari penerimaan dikurangi biaya variabel)	24.413.907
Total		41.489.492

(Data primer, 2016)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa biaya variabel untuk solar yaitu sebesar Rp 11.742.000, biaya variabel untuk penggunaan es batu yaitu sebesar Rp 2.280.000, biaya variabel yang dikeluarkan untuk konsumsi yaitu sebesar Rp 1.368.000, biaya variabel yang dikeluarkan untuk biaya tambat labuh kapal yaitu sebesar Rp 38.000, biaya untuk retribusi sebesar Rp 1.647.585, dan komponen biaya variabel terbesar yaitu upah ABK dimana sistem yang digunakan adalah bagi hasil, upah ABK diperoleh dari 50% dari total keuntungan yang diperoleh usaha tersebut yaitu sebesar Rp24.413.907 Dan total biaya variabel yang dikeluarkan nelayan alat tangkap payang gardan selama satu bulan (19 trip penangkapan) sebesar Rp41.489.492

c) Penerimaan

Menurut Munir (2010), penerimaan atau pendapatan merupakan hasil kali total produk dengan harga produk per satuan. Penerimaan unit usaha penangkapan payang gardan diperoleh dari total hasil tangkapan selama satu bulan (19 kali trip penangkapan) dikali harga ikan. Penerimaan yang diperoleh unit usaha penangkapan payang gardan dalam satu bulan yaitu sebesar Rp 65.903.400. Total penerimaan unit penangkapan payang gardan selama satu bulan disajikan pada Tabel 27.

Tabel 27. Total penerimaan unit penangkapan payang gardan selama satu bulan

No	Deskripsi	Harga Jual (Rp)
1	Dalam satu bulan 19 kali penangkapan (Data primer, 2016)	65.903.400

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total produksi pada bulan Mei yaitu nelayan alat tangkap payang gardan melakukan operasi penangkapan sebanyak 19 kali dengan total penerimaan dari hasil penjualan tangkapan sebesar Rp 65.903.400.

d) RC Ratio

Menurut Soekartawi (1994), *Revenue Cost Ratio* dikenal sebagai perbandingan antara penerimaan dengan biaya yang bertujuan untuk mengetahui apakah suatu usaha sudah menghasilkan keuntungan atau belum menghasilkan keuntungan. Dengan membandingkan *total revenue* dan *total cost*, maka ada 3 (tiga) kemungkinan yang akan terjadi, yaitu:

$R/C > 1$, maka usaha dikatakan menguntungkan

$R/C = 1$, maka usaha dikatakan tidak untung dan tidak rugi

$R/C < 1$, maka usaha dikatakan mengalami kerugian

RC Ratio pada usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap payang gardan menunjukkan nilai 1,48 yang berarti nilai RC ratio lebih besar dari satu dapat diketahui bahwa usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap payang gardan menguntungkan, karena dengan investasi terhadap usaha ini penerimaan yang diperoleh akan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

e) Keuntungan

Menurut Bachtiar (2002), keuntungan usaha atau pendapatan bersih adalah besarnya penerimaan setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan

untuk proses produksi baik tetap maupun tidak tetap. Keuntungan pemilik kapal (juragan) diperoleh dari total penerimaan (Rp) dikurangi dari total biaya untuk pengeluaran usaha (Rp). Besarnya keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut yaitu sebesar Rp 48.827.815 sebelum dikurangi upah ABK. Biaya yang dikeluarkan untuk upah ABK yaitu 50% dari keuntungan yang diperoleh usaha tersebut. Maka keuntungan yang diterima oleh pemilik kapal (juragan) sebesar Rp 24.413.907 dikurangi biaya tetap sebesar Rp 3.014.096 sehingga diperoleh keuntungan bersih pemilik kapal (juragan) sebesar Rp 21.399.811 per bulan.

Dari hasil yang diperoleh dapat dianalisis bahwa hampir semua nelayan yang menjual ikan hasil tangkapannya melalui TPI adalah nelayan dengan alat tangkap yang besar dan hasil tangkapan yang banyak, sehingga mereka berkeinginan agar ikan hasil tangkapannya cepat terjual karena mereka tahu bahwa peran TPI dapat membantu menjual ikan nelayan dengan cepat, harga jual melalui lelang juga lebih tinggi dibanding dengan harga ikan yang dijual langsung kepada bakul. Selain itu hasil yang diterima nelayan dari penjualan ikan melalui lelang dapat diterima secara tunai. Nelayan juga tidak merasa keberatan dengan adanya retribusi sebesar 2,5% mereka masih tetap merasa diuntungkan dengan menjual hasil tangkapan secara lelang di TPI daripada menjual langsung hasil tangkapannya kepada bakul.

5.4.3 Penerimaan Nelayan yang Menjual Ikan Hasil Tangkapan di Luar TPI

1. Nelayan Alat Tangkap Jaring (*Gill Net*)

Salah satu alat tangkap yang juga banyak digunakan di Desa Bulumeduro adalah jaring *Gill net* dengan menggunakan perahu berkapasitas 4 GT, dan hasil tangkapan tidak sebanyak perahu gardan. Hasil tangkapan nelayan ini semua dijual langsung kepada bakul ataupun dijual langsung oleh istri-istri nelayan tersebut. Hal ini seperti penuturan Ibu Panut (55 tahun) yang merupakan Istri nelayan dan berprofesi sebagai bakul, beliau menyebutkan bahwa:

“hasil tangkapannya sedikit mas, kalau dijual lewat lelang nanti masih dipotong retribusi lagi jadi untungnya tambah sedikit, biasanya ikannya langsung saya jual ke tengkulak dan ke bakul-bakul langganan saya di pasar.”

Biasanya nelayan jaring melaut dari pukul 03.00 – 12.30 WIB, dengan membawa ABK sebanyak 3 – 4 orang, dan membawa peralatan melaut seperti : jaring $1\frac{3}{4}$ inch, 3 inch, dan 5 inch, perahu, dan diesel 12 PK. Jenis ikan yang sering ditangkap adalah ikan petek, ikan kembung, ikan patin, dan ikan gerabah. Nelayan dengan alat tangkap jaring lebih sedikit kendala dalam operasi penangkapan karena beroperasi pada saat hari terang sehingga tidak terpengaruh dengan cahaya. Hambatan yang dihadapi nelayan jaring biasanya arus dan angin yang kencang.

a) Modal Tetap

Modal secara umum dapat dibedakan atas modal aktif dan modal pasif. Modal aktif terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Sedangkan modal pasif terdiri dari modal sendiri dan modal asing. Modal usaha dalam pengertian ekonomi adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja untuk menghasilkan suatu barang baru (riyanto, 1995).

Modal tetap yang dikeluarkan pada usaha unit penangkapan *gill net* di Desa Bulumeduro yaitu sebesar Rp 22.825.000. Biaya tetap usaha unit penangkapan *gill net* meliputi kapal, mesin, alat tangkap, basket, dan jerigen. Ada pun rincian komponen biaya tetap yang disajikan pada Tabel 28.

Tabel 28. Modal tetap unit penangkapan *gill net*

No	Jenis barang	Jumlah (unit)	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Kapal	1	16.000.000	16.000.000
2	Mesin	1	3.500.000	3.500.000
3	Alat tangkap	3	1.000.000	3.000.000
4	Basket	4	50.000	200.000
5	Jerigen	2	62.500	125.000
	Total			22.825.000

(Data primer, 2016)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa modal tetap yang terbesar yaitu untuk pembelian perahu yaitu sebesar Rp 16.000.000. Modal tetap untuk membeli mesin yaitu sebesar Rp 3.500.000, untuk pembelian alat tangkap jaring sebanyak 3 unit sebesar Rp 3.000.000, untuk pembelian basket sebanyak 4 unit sebesar Rp 200.000, untuk pembelian jerigen sebanyak 2 unit yaitu sebesar Rp 125.000.

b) Biaya Produksi

Menurut Riyanto (1995), biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang terjadi pada produksi jangka pendek. Biaya produksi ini dikeluarkan suatu usaha untuk melakukan kegiatan memproduksi sehingga menghasilkan output. Biaya tetap merupakan biaya yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Sedangkan biaya tidak tetap adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi.

Biaya produksi yang dikeluarkan pada unit penangkapan *gill net* terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Besarnya biaya tetap dan biaya variabel unit usaha penangkapan *gill net* adalah sama, karena nelayan dengan alat tangkap *gill net* menggunakan perahu dengan *gross tonnage* (GT), dan peralatan yang dibawa relatif sama. Komponen biaya tetap untuk unit penangkapan payang gardan disajikan pada Tabel 29.

Tabel 29. Komponen biaya tetap unit penangkapan *gill net*

No	Biaya Tetap	Biaya (Rp)
1	Penyusutan kapal	88.889
2	Penyusutan mesin	53.333
3	Penyusutan jaring	31.250
4	Penyusutan basket	8.333
5	Penyusutan jerigen	5.208
6	Perawatan	66.667
Total		253.680

(Data primer, 2016)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa total biaya tetap unit penangkapan *gill net* yaitu sebesar Rp 253.680. Komponen biaya lain yaitu biaya

variabel dengan komponen biaya solar, konsumsi, dan upah ABK. Komponen biaya variabel pada usaha unit penangkapan *gill net* disajikan pada Tabel 30.

Tabel 30. Biaya variabel unit penangkapan *gill net*

No	Biaya Variabel	Biaya (Rp)
1	Solar (Rp 5.150 x 23 trip pada bulan Mei x 8 liter per trip)	947.600
2	Konsumsi (Rp 5.000 x 23 trip pada bulan Mei x 4 bungkus)	460.000
3	Upah ABK (50% dari penerimaan dikurangi biaya variabel)	5.621.200
Total		7.028.800

(Data primer, 2016)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa biaya variabel untuk solar yaitu sebesar Rp 947.600, biaya variabel yang dikeluarkan untuk konsumsi yaitu sebesar Rp 460.000, dan komponen biaya variabel terbesar yaitu upah ABK dimana sistem yang digunakan adalah bagi hasil, upah ABK diperoleh dari 50% dari total keuntungan yang diperoleh usaha tersebut yaitu sebesar Rp 5.621.200. Dan total biaya variabel yang dikeluarkan nelayan alat tangkap *gill net* selama satu bulan (23 trip penangkapan) sebesar Rp 7.028.800

c) Penerimaan

Menurut Munir (2010), penerimaan atau pendapatan merupakan hasil kali total produk dengan harga produk per satuan. Penerimaan unit usaha penangkapan *gill net* diperoleh dari total hasil tangkapan selama satu bulan (23 kali trip penangkapan) dikali harga ikan. Penerimaan yang diperoleh unit usaha penangkapan *gill net* dalam satu bulan yaitu sebesar Rp 12.650.000. Total penerimaan unit penangkapan *gill net* selama satu bulan disajikan pada Tabel 31.

Tabel 31. Total penerimaan unit penangkapan *gill net* selama satu bulan

No	Deskripsi	Harga Jual (Rp)
1	Dalam satu bulan 23 kali penangkapan	12.650.000

(Data primer, 2016)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total produksi pada bulan Mei yaitu nelayan alat tangkap *gill net* melakukan operasi penangkapan sebanyak 23 kali dengan total penerimaan dari hasil penjualan tangkapan sebesar Rp 12.650.000.

d) RC Ratio

Menurut Soekartawi (1994), *Revenue Cost Ratio* dikenal sebagai perbandingan antara penerimaan dengan biaya yang bertujuan untuk mengetahui apakah suatu usaha sudah menghasilkan keuntungan atau belum menghasilkan keuntungan. Dengan membandingkan *total revenue* dan *total cost*, maka ada 3 (tiga) kemungkinan yang akan terjadi, yaitu:

$R/C > 1$, maka usaha dikatakan menguntungkan

$R/C = 1$, maka usaha dikatakan tidak untung dan tidak rugi

$R/C < 1$, maka usaha dikatakan mengalami kerugian

RC Ratio pada usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap *gill net* menunjukkan nilai 1,74 yang berarti nilai RC ratio lebih besar dari satu dapat diketahui bahwa usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap *gill net* menguntungkan, karena dengan investasi terhadap usaha ini penerimaan yang diperoleh akan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

e) Keuntungan

Menurut Bachtar (2002), keuntungan usaha atau pendapatan bersih adalah besarnya penerimaan setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi baik tetap maupun tidak tetap. Keuntungan pemilik perahu (juragan) diperoleh dari total penerimaan (Rp) dikurangi dari total biaya untuk pengeluaran usaha (Rp). Besarnya keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut yaitu sebesar Rp 11.242.400 sebelum dikurangi upah ABK. Biaya yang dikeluarkan untuk upah ABK yaitu 50% dari keuntungan yang diperoleh usaha tersebut. Maka keuntungan yang diterima oleh pemilik perahu (juragan) sebesar

Rp 5.621.200 dikurangi biaya tetap sebesar Rp 253.680 sehingga diperoleh keuntungan bersih pemilik perahu (juragan) sebesar Rp 5.367.520 per bulan.

2. Nelayan Alat Tangkap (*Othok*) Pukat Harimau

Alat tangkap yang juga banyak digunakan para nelayan di Desa Bulumeduro adalah pukat harimau atau biasa masyarakat menyebutnya "othok". Meskipun alat tangkap ini telah dilarang penggunaannya karena tidak ramah lingkungan, tetapi nelayan di Desa Bulumeduro masih tetap menggunakan alat tangkap ini untuk menangkap ikan. Pemerintah sendiri tidak menindak tegas nelayan yang masih menggunakan alat tangkap ini.

Nelayan dengan alat tangkap "othok" biasanya menggunakan perahu berkapasitas 4 GT dengan jumlah ABK sebanyak 3 - 4 orang. Waktu operasi penangkapan yaitu pukul 04.30 – 12.00 WIB. Ikan hasil tangkapan berupa ikan ikan dasar.

a) Modal Tetap

Modal secara umum dapat dibedakan atas modal aktif dan modal pasif. Modal aktif terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Sedangkan modal pasif terdiri dari modal sendiri dan modal asing. Modal usaha dalam pengertian ekonomi adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja untuk menghasilkan suatu barang baru (riyanto, 1995).

Modal tetap yang dikeluarkan pada usaha unit penangkapan "othok" di Desa Bulumeduro yaitu sebesar Rp 22.325.000. Biaya tetap usaha unit penangkapan "othok" meliputi kapal, mesin, alat tangkap, basket, dan jerigen. Ada pun rincian komponen biaya tetap yang disajikan pada Tabel 32.

Tabel 32. Modal tetap unit penangkapan “othok”

No	Jenis barang	Jumlah (unit)	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Kapal	1	16.000.000	16.000.000
2	Mesin	1	3.500.000	3.500.000
3	Alat tangkap	1	2.500.000	2.500.000
4	Basket	4	50.000	200.000
5	Jerigen	2	62.500	125.000
	Total			22.325.000

(Data primer, 2016)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa modal tetap yang terbesar yaitu untuk pembelian perahu yaitu sebesar Rp 16.000.000. Modal tetap untuk membeli mesin yaitu sebesar Rp 3.500.000, untuk pembelian alat tangkap sebesar Rp 2.500.000, untuk pembelian basket sebanyak 4 unit sebesar Rp 200.000, untuk pembelian jerigen sebanyak 2 unit yaitu sebesar Rp 125.000.

b) Biaya Produksi

Menurut Riyanto (1995), biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang terjadi pada produksi jangka pendek. Biaya produksi ini dikeluarkan suatu usaha untuk melakukan kegiatan memproduksi sehingga menghasilkan output. Biaya tetap merupakan biaya yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Sedangkan biaya tidak tetap adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi.

Biaya produksi yang dikeluarkan pada unit penangkapan “othok” terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Besarnya biaya tetap dan biaya variabel unit usaha penangkapan “othok” adalah sama, karena nelayan dengan alat tangkap “othok” menggunakan perahu dengan *gross tonage* (GT), dan peralatan yang dibawa relatif sama. Komponen biaya tetap untuk unit penangkapan payang gardan disajikan pada Tabel 33.

Tabel 33. Komponen biaya tetap unit penangkapan “othok”

No	Biaya Tetap	Biaya (Rp)
1	Penyusutan kapal	88.889
2	Penyusutan mesin	53.333
3	Penyusutan jaring	41.667
4	Penyusutan basket	8.333
5	Penyusutan jerigen	5.208
6	Perawatan	91.667
Total		289.097

(Data primer, 2016)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa total biaya tetap unit penangkapan “othok” yaitu sebesar Rp 289.097. Komponen biaya lain yaitu biaya variabel dengan komponen biaya solar, konsumsi, dan upah ABK. Komponen biaya variabel pada usaha unit penangkapan “othok” disajikan pada Tabel 34.

Tabel 34. Biaya variabel unit penangkapan “othok”

No	Biaya Variabel	Biaya (Rp)
1	Solar (Rp 5.150 x 23 trip pada bulan Mei x 10 liter per trip)	1.184.500
2	Konsumsi (Rp 5.000 x 23 trip pada bulan Mei x 4 bungkus)	460.000
3	Upah ABK (50% dari penerimaan dikurangi biaya variabel)	4.571.250
Total		6.215.750

(Data primer, 2016)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa biaya variabel untuk solar yaitu sebesar Rp 1.184.500, biaya variabel yang dikeluarkan untuk konsumsi yaitu sebesar Rp 460.000, dan komponen biaya variabel terbesar yaitu upah ABK dimana sistem yang digunakan adalah bagi hasil, upah ABK diperoleh dari 50% dari total keuntungan yang diperoleh usaha tersebut yaitu sebesar Rp 4.571.250. Dan total biaya variabel yang dikeluarkan nelayan alat tangkap “othok” selama satu bulan (23 trip penangkapan) sebesar Rp 6.215.750

c) Penerimaan

Menurut Munir (2010), penerimaan atau pendapatan merupakan hasil kali total produk dengan harga produk per satuan. Penerimaan unit usaha

penangkapan “othok” diperoleh dari total hasil tangkapan selama satu bulan (23 kali trip penangkapan) dikali harga ikan. Penerimaan yang diperoleh unit usaha penangkapan “othok” dalam satu bulan yaitu sebesar Rp 10.787.000. Total penerimaan unit penangkapan “othok” selama 1 bulan disajikan pada Tabel 35

Tabel 35. Total penerimaan unit penangkapan “othok” selama satu bulan

No	Deskripsi	Harga Jual (Rp)
1	Dalam satu bulan 23 kali penangkapan (Data primer, 2016)	10.787.000

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total produksi pada bulan Mei yaitu nelayan alat tangkap “othok” melakukan operasi penangkapan sebanyak 23 kali dengan total penerimaan dari hasil penjualan tangkapan sebesar Rp 10.787.000.

d) RC Ratio

Menurut Soekartawi (1994), *Revenue Cost Ratio* dikenal sebagai perbandingan antara penerimaan dengan biaya yang bertujuan untuk mengetahui apakah suatu usaha sudah menghasilkan keuntungan atau belum menghasilkan keuntungan. Dengan membandingkan *total revenue* dan *total cost*, maka ada 3 (tiga) kemungkinan yang akan terjadi, yaitu:

$R/C > 1$, maka usaha dikatakan menguntungkan

$R/C = 1$, maka usaha dikatakan tidak untung dan tidak rugi

$R/C < 1$, maka usaha dikatakan mengalami kerugian

RC Ratio pada usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap “othok” menunjukkan nilai 1,66 yang berarti nilai RC ratio lebih besar dari satu dapat diketahui bahwa usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap “othok” menguntungkan, karena dengan investasi terhadap usaha ini penerimaan yang diperoleh akan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

e) Keuntungan

Menurut Bachtiar (2002), keuntungan usaha atau pendapatan bersih adalah besarnya penerimaan setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi baik tetap maupun tidak tetap. Keuntungan pemilik perahu (juragan) diperoleh dari total penerimaan (Rp) dikurangi dari total biaya untuk pengeluaran usaha (Rp). Besarnya keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut yaitu sebesar Rp 9.142.500 sebelum dikurangi upah ABK. Biaya yang dikeluarkan untuk upah ABK yaitu 50% dari keuntungan yang diperoleh usaha tersebut. Maka keuntungan yang diterima oleh pemilik kapal (juragan) sebesar Rp 4.571.250 dikurangi biaya tetap sebesar Rp 289.097 sehingga diperoleh keuntungan bersih pemilik perahu (juragan) sebesar Rp 4.282.153 per bulan.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dianalisis bahwa hampir seluruh nelayan yang menjual hasil tangkapannya di luar TPI tanpa lelang merupakan nelayan dengan alat tangkap kecil yaitu dengan perahu 4 GT sehingga tangkapan yang diperoleh sedikit dan apabila dijual secara lelang dan dipotong biaya retribusi maka hasilnya semakin kecil. Selain itu sebagian nelayan yang menjual tangkapan di luar TPI juga merangkap sebagai bakul atau mereka telah memiliki ikatan kerjasama sebelumnya dengan bakul.

Tingkat pendapatan nelayan yang menjual ikan melalui TPI dan di luar TPI dari hasil penelitian didapatkan bahwa nelayan yang menjual ikan hasil tangkapan melalui TPI memiliki pendapatan lebih tinggi. Sedangkan nelayan yang menjual ikan hasil tangkapan di luar TPI memiliki pendapatan rendah. Hal ini terjadi karena nelayan yang menjual ikan melalui TPI adalah nelayan besar dengan kapal dan alat tangkap yang besar, sedangkan nelayan yang menjual ikan di luar TPI sebagian besar adalah nelayan kecil dengan perahu dan alat tangkap yang kecil.

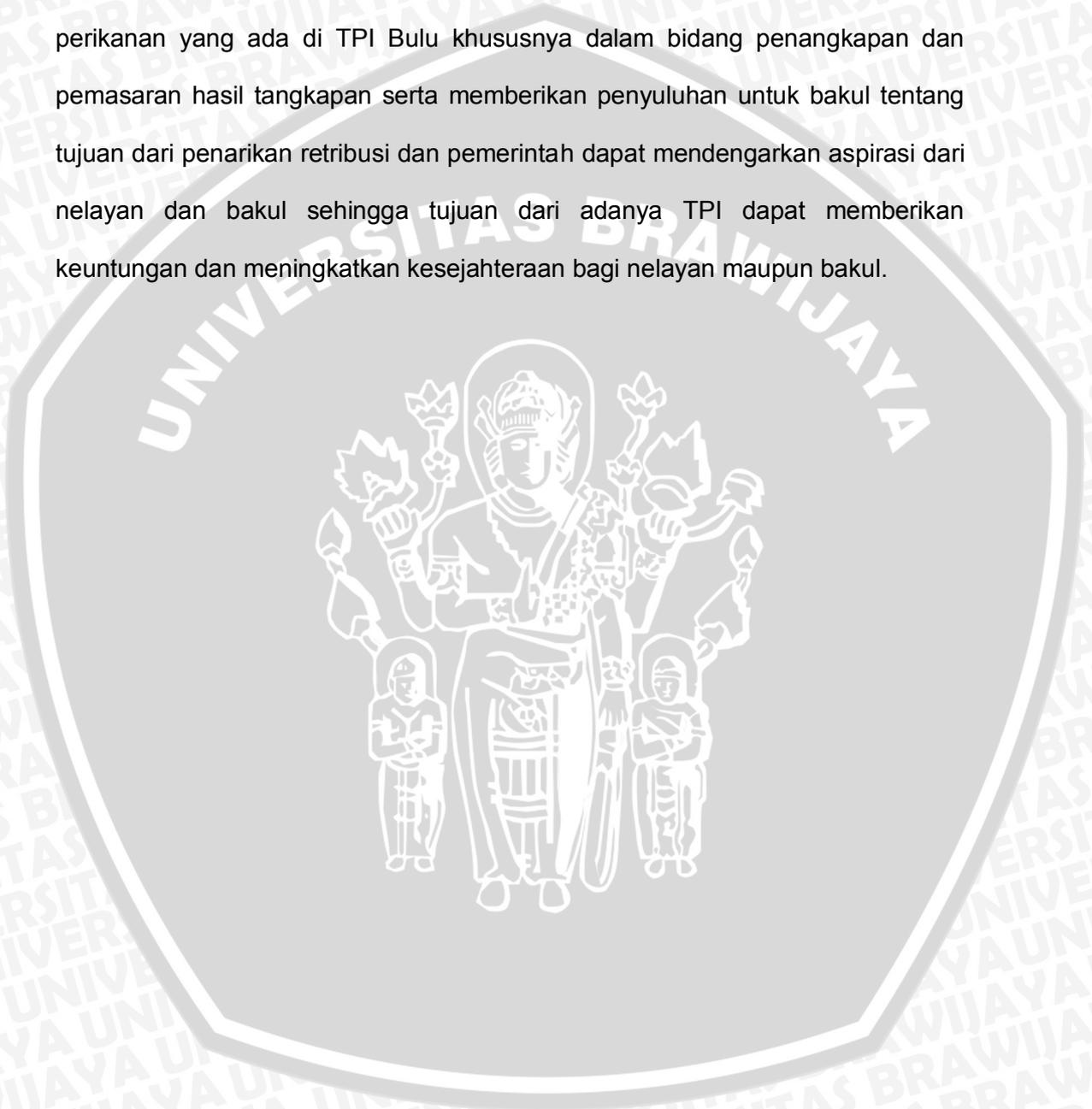
5.5 Implikasi dari Peranan TPI Dalam Penjualan Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Desa Bulumeduro

Dari uraian – uraian di atas dapat diketahui bahwa peranan TPI Bulu dalam penjualan ikan hasil tangkapan nelayan dapat dikatakan berjalan cukup baik, diantaranya karena tersediannya berbagai fasilitas untuk menunjang berbagai kegiatan perikanan di TPI Bulu, diantaranya adalah tempat labuh kapal, bongkar muat hasil tangkapan, penyaluran perbekalan, pemeliharaan alat tangkap, penanganan hasil tangkapan, pelelangan ikan, pengepakan dan pendistribusian, penyuluhan dan pelatihan, pengumpulan data statistik. Selain itu kemudahan yang diberikan pihak TPI Bulu dalam melayani nelayan dan bakul dalam proses pelelangan dianggap menguntungkan bagi nelayan dan bakul karena prosedur lelang mudah, harga ikan melalui lelang sesuai harga di pasaran, proses administrasi mudah dan cepat dan pembayaran secara tunai. Berdasarkan Peraturan Bupati No. 49 tahun 2014 BAB IV pasal 5 tentang struktur dan besarnya tarif retribusi, dimana 2,5% dipungut dari nelayan (penjual) dan 2,5% dipungut dari bakul (pembeli). Dari peraturan yang ditetapkan ini pihak nelayan tidak merasa keberatan karena nelayan masih merasa diuntungkan dengan adanya kegiatan pelelangan di TPI Bulu, tetapi pihak bakul merasa keberatan dengan penetapan besaran retribusi karena mereka merasa keuntungan yang diperoleh semakin sedikit. Dari kemudahan yang diberikan pihak TPI seharusnya menjadikan nelayan dan bakul tidak melakukan transaksi jual beli di luar TPI, namun ada beberapa faktor yang menyebabkan nelayan melakukan transaksi di luar TPI yaitu hasil tangkapan yang sedikit, nelayan merangkap sebagai bakul, dan ada ikatan kerjasama dengan bakul.

Nelayan yang menjual hasil tangkapan melalui TPI dengan proses lelang adalah nelayan dengan alat tangkap skala besar dan nelayan yang menjual hasil tangkapan di luar TPI sebagian besar adalah nelayan dengan alat tangkap skala

kecil. Pendapatan nelayan yang menjual hasil tangkapan melalui TPI lebih tinggi daripada nelayan yang menjual hasil tangkapan di luar TPI.

Dalam hal ini, agar tujuan dapat tercapai maka pemerintah perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan terkait aktivitas perikanan yang ada di TPI Bulu khususnya dalam bidang penangkapan dan pemasaran hasil tangkapan serta memberikan penyuluhan untuk bakul tentang tujuan dari penarikan retribusi dan pemerintah dapat mendengarkan aspirasi dari nelayan dan bakul sehingga tujuan dari adanya TPI dapat memberikan keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi nelayan maupun bakul.



6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian lapang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Bulumeduro Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

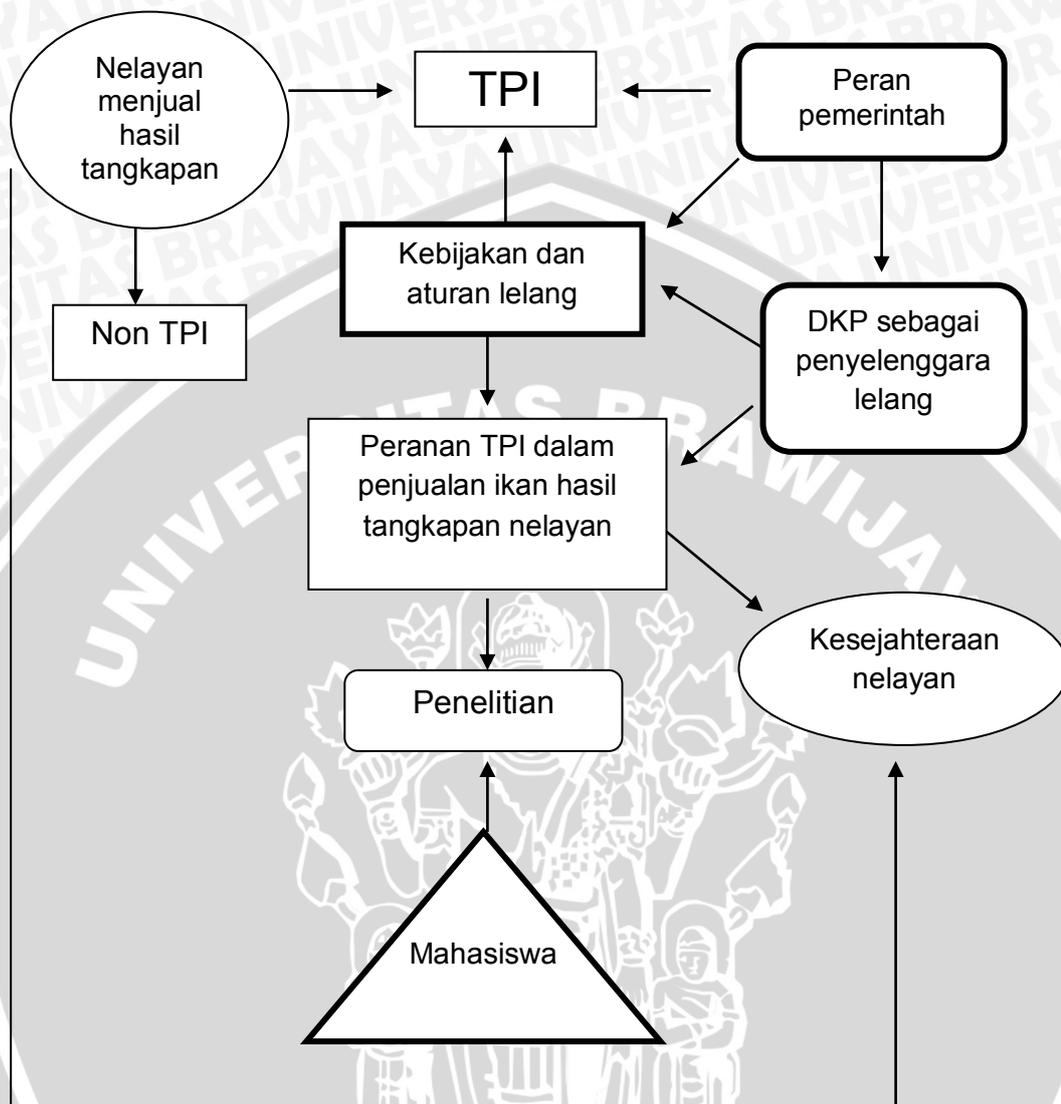
1. Kegiatan perikanan yang ada di TPI Bulu meliputi bongkar muat ikan, penimbangan ikan, hingga kegiatan pelelangan sampai ke tahap administrasi. Kegiatan ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan pemerintah, karena masih ada kapal yang tidak melakukan bongkar muat di TPI dan tidak menjual ikan melalui lelang.
2. Peran TPI dalam penjualan ikan hasil tangkapan nelayan sudah berjalan cukup baik mulai dari proses pelelangan hingga proses administrasi. Hanya saja masih terdapat beberapa bakul atau peserta lelang yang kurang tertib dalam mengikuti peraturan pelelangan dan merasa keberatan dengan besarnya tarif retribusi yang dikenakan.
3. Banyak kelebihan dan keuntungan yang dirasakan oleh nelayan dan bakul dari kegiatan lelang di TPI. Tetapi masih ada beberapa nelayan dan bakul yang melakukan transaksi jual beli di luar TPI dengan alasan masing-masing.
4. Tingkat pendapatan nelayan yang menjual ikan melalui TPI tinggi sedangkan tingkat pendapatan nelayan yang menjual ikan di luar TPI rendah.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran beberapa hal, antara lain:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban sebagai lembaga formal perlu meningkatkan pelayanan terkait aktivitas yang ada di TPI Bulu. Misalnya dalam pengadaan dan pengoptimalan fasilitas penunjang TPI agar nelayan merasa nyaman dan mutu ikan hasil tangkapan dapat terjaga.
2. Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai lembaga terkait pelaksanaan pelelangan di TPI Bulu harus lebih mendengarkan aspirasi nelayan maupun bakul. Serta perlu adanya pembinaan secara berkala yang diberikan oleh lembaga terkait kepada para Karyawan TPI, nelayan, maupun bakul
3. Pihak TPI harus lebih tegas dalam menegakkan peraturan sesuai dengan Perda nomor 12 tahun 2015 tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan maupun Perbup nomor 49 tahun 2014 tentang retribusi tempat pelelangan.
4. Perlunya partisipasi ilmiah lebih lanjut, agar dapat membuka peluang kepada peneliti lain untuk melanjutkan penelitian. Karena mahasiswa berperan sebagai *agent of change*, *social control* dan *iron stock*.

FLOWCHART SARAN PENELITIAN SKRIPSI



Gambar. 8 Diagram Alir Saran Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, Y. Et Al. 2002. Pembesaran Ikan Mas di Kolam Air Deras. Tim Lentera.
- Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar – Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Danfar. 2009. Definisi/pengertian Pemasaran (Marketing). <http://densite.wordpress.com/2009/03/24/definisi-pemasaran-marketing/>. Diakses tanggal 15 Maret 2016.
- DKP. 2013. Potensi Perikanan dan Kelautan Tuban. <http://tubankab.go.id/tuban-23-perikanan%20&%20kelautan.html>. Diakses tanggal 15 Januari 2016.
- Harian Bulu. 2014. Media Informasi Masyarakat Pesisir Bulu CTB Senang TPI Beroperasi.htm. Diakses pada 17 Pebruari 2016.
- Hidayatullah. 2013. Analisis Pendapatan Pengusaha Perikanan Tangkap Pada Pelabuhan Perikanan Idi Kabupaten Aceh Timur.
- Imron, M. 2003 “Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan” dalam jurnal masyarakat dan budaya. PMB-LIPI. Jalaludin 2002. *Teknologi Pendidikan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Jakfar dan Kasmir 2003. Studi Kelayakan Bisnis. Prenada Media Kencana. Jakarta. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Kotler, Philip. 1995. Manajemen Pemasran. PT Indeks. Jakarta
- Kusnadi. 2003. Akar Kemiskinan Nelayan. LkiS. Yogyakarta
- Kusnadi. 2004. Polemik Kemiskinan Nelayan. Bogor : Pokja Pembaruan
- Laka, Fransiskus. 2003. Arahkan Lokasi Dan Strategi Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan di Kawasan Pesisir Utara Kabupaten Sikka – Nusa Tenggara Timur. eprints.undip.ac.id/6069/1/fransiskusTA.pdf. diakses pada tanggal 16 Februari 2016.
- Lubis, E. 2006. Buku I: Pengantar Pelabuhan Perikanan. Bogor: Laboratorium Pelabuhan Perikanan, Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kemlautan. Institut Pertanian Bogor.
- Mankiw, N Gregori. 2003. Pengantar Ekonomi Edisi 2 Jilid 1. Erlanga. Jakarta.
- Mubyarto, Et Al. 1984. Nelayan dan Kemiskinan; Studi Antropologi di Dua Desa Pantai. Rajawali, Jakarta.
- Mubyarto, 1995. Pengantar Ekonomi Pertanian. LP3ES. Jakarta.

- Munir, I. 2010. Study Kelayakan Bisnis. Pusat Pengembangan Bahan Ajar Umb. Jakarta.
- Peraturan Daerah Tuban Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Retribusi Tempat Pelelangan. Tuban.
- Riyanto, B. 1997. Dasar – Dasar Pembelanjaan Usaha. Bpfe. Yogyakarta.
- Satria A. 2002. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Jakarta [ID]: PT. Pustaka Cidesindo. 130 hal.
- Soekartawi. 1994. Agribisnis : Teori Dan Aplikasinya. Pt Rajawali Press. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Alfabeta. Bandung.
- Susilo, Edi. 1986. Nelayan di antara Tengkulak dan Tempat Pelelangan Ikan Suatu Analisa Teoritik. Seminar Nasional Ilmu – Ilmu Sosial Mempersiapkan Masyarakat Masa Depan di Ujung Pandang tanggal 15-19 Desember 1986. Himpunan Indonesia Untuk Pengembangan Ilmu – Ilmu Sosial.
- _____. 2010. *Dinamika Struktur Sosial dalam Ekosistem Pesisir*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Sutami, Ari. 2012. Peran TPI Terhadap Proses Penjualan Ikan Bagi Nelayan dan Bakul Ikan di Tempat Pelelangan Ikan TPI Glondonggede Desa Glondonggede Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Brawijaya. Malang.
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
- Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU NO 31 Tahun 2004.
- Yin, Robert K. 2009. Studi Kasus. Desain dan Metode
- Yustiarani, Anisa. 2008. Kajian Pendapatan Nelayan dari Usaha Penangkapan Ikan dan Bagian Retribusi Pelelangan Ikan Di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. IPB. Bogor.

Lampiran

Lampiran 1. Dokumentasi foto kegiatan penelitian



(Foto bersama UPTD perikanan Kecamatan Bancar dan Administratur TPI)



(Foto kegiatan wawancara dengan nelayan)



(Foto kegiatan wawancara dengan bakul)



(Foto kegiatan pelelangan di TPI Bulu)



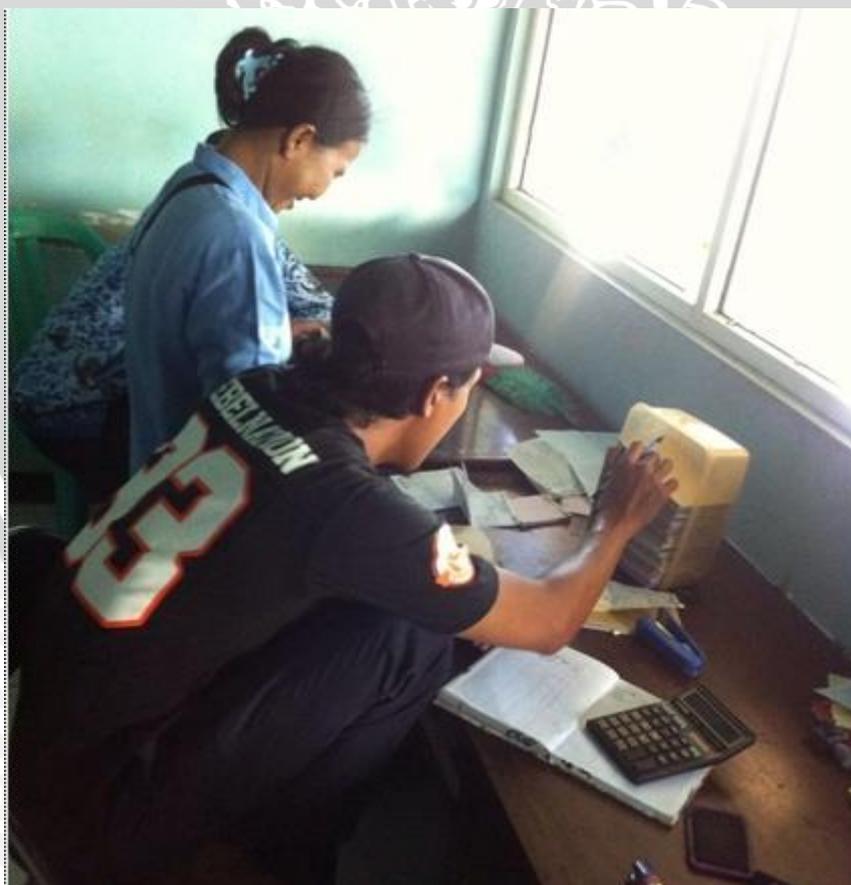
(Foto kegiatan pencatatan karcis lelang)



(Foto kegiatan transaksi jual beli di luar TPI)



(Foto kegiatan pencatatan karcis lelang)



(Foto kegiatan administrasi lelang)